

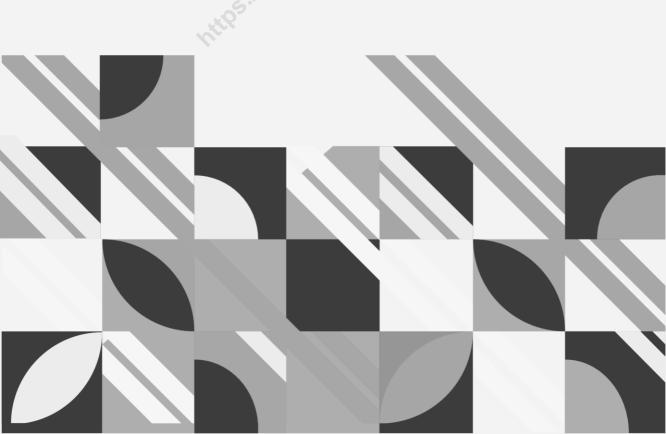
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Tanah Bumbu **2023**



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Tanah Bumbu 65.00.1d 2023



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANAH BUMBU **TAHUN 2023**

No. Katalog : 4102004.63.10

No. Publikasi : 63100.2323

Iltanahbumbukab bos.go.id Ukuran Buku : B5 ISO (17,6 cm x 25 cm)

Jumlah Halaman : xi + 101 halaman

Naskah:

Adela Azzahra

Ayuningtyas Yanindah

Desy Aryani

Mega Novitasari

Desain dan Tata Letak

Desy Aryani

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kelancaran bagi kami sehingga publikasi "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu 2023" ini bisa selesai. Publikasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu dalam beberapa tahun terakhir.

Publikasi ini menyajikan beberapa indikator yang menggambarkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Tanah Bumbu. Istilah kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas. Publikasi ini merupakan data hasil pendataan BPS, sebagian besar merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Masyarakat (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

Kami berharap publikasi ini dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan publikasi ini.

> Batulicin, Desember 2023 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Ihsan Nulhakim, S.Si, M.Si



DAF	ΓAF	R ISI	iv
DAF	ΓAF	R TABEL	vi
		R GAMBAR	
1.KE	PE	NDUDUKAN	3
1.	1.	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	4
		Persebaran dan Kepadatan Penduduk	
1.	3.	Komposisi Penduduk	9
1.	4.	Wanita menurut Usia Perkawinan Pertama	. 13
2.KE	SEI	HATAN	. 19
2.	1.	Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	. 21
2.	2.	Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	. 23
2.:	3.	Penggunaan Alat/Cara KB	. 24
3.PE	ND	IDIKAN	. 29
3.	1.	Kemampuan Membaca dan Menulis	. 30
3.	2.	Rata-Rata Lama Sekolah	. 31
3.:	3.	Partisipasi Sekolah	. 33
3.4	4.	Tingkat Pendidikan	. 36
4. KE	TE	NAGAKERJAAN	. 41
4.	1.	Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka	. 42
4.	2.	Tingkat Pengangguran	. 45
4.	3.	Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	. 48
5. KC	NC	SUMSI RUMAH TANGGA	. 55
5.	1.	Pengeluaran Rumah Tangga	. 56
6. PE	RL	IMAHAN	. 65

6.1.	Kualitas Rumah Tinggal	66
6.2.	Fasilitas Rumah Tinggal	69
7. KEM	ISKINAN	77
7.1.	Perkembangan Kemiskinan Tanah Bumbu	81
7.2.	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	83
8. SOSI	AL LAINNYA	89
8.1.	Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	90
8.2.	Program Perlindungan Sosial	91
8.3.	Jaminan Sosial	92
8.4.	Kepemilikan Aset	93
Lampir	an	95



Tabel 1	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-20235
Tabel 2	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
	Kabupaten Tanah Bumbu menurut Kecamatan Tahun
	2023
Tabel 3	Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu menurut Jenis
	Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2022 (jiwa)9
Tabel 4	Komposisi Penduduk (persen) dan Angka Beban
	Kebergantungan (Dependency Ratio) Penduduk
	Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-202311
Tabel 5	Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu
	Menurut Usia Produktif dan Tidak Produktif Tahun 2022 12
Tabel 6	Angka Morbiditas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten
	Tanah Bumbu Tahun 202222
Tabel 7	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut
	Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten
	Tanah Bumbu Tahun 202231
Tabel 8	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut
	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di
	Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 202237
Tabel 9	Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama dan Jenis
	Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 202343
Tabel 10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis
	Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 (persen)
	47

Tabel 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan tingkat Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 (perser	۱)
Tabel 12 Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaa dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahu 2023	n n
Tabel 13 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menuru Kelompok Barang Rumah Tangga Kabupaten Tana Bumbu, 2022 dan 2023	h
Tabel 14 Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per hal penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 da 2023	n
Tabel 15 Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per hal penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 da 2023	n
Tabel 16 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapit Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Bumb ,Tahun 2022 dan 202369	u
Tabel 17 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minur Bersih dan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Tana Bumbu, Tahun 2022 dan 202370	h
Tabel 18 Perkembangan Kondisi Kemiskinan Kabupaten Tana Bumbu 2018-20228	
Tabel 19 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menuru Penggunaan Teknologi Informasi di Kabupaten Tana Bumbu Tahun, 20229	h
Tabel 20 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Tanah Bumbu Tahu 20229	n
Tabel 21 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosia	

Tabel 22 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Menurut Jenis Aset di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 202294



Gambar 1	Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten
	Tanah Bumbu Tahun 2021-2022 (persen)6
Gambar 2	Piramida Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
	202311
Gambar 3	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10
	Tahun ke Atas menurut Umur Perkawinan Pertama di
	Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 202214
Gambar 4	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dan
	Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 (Tahun)21
Gambar 5	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang
	Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir dan Penolong
	Kelahiran Terakhir Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
	24
Gambar 6	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-
	49 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Penggunaan
	Alat/Cara KB di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-
	202226
Gambar 7	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan dan
	Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018-2022 (tahun)32
Gambar 8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal+Non Formal
	menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten
	Tanah Bumbu Tahun 202234
Gambar 9	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal+NonFormal
	menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten
	Tanah Bumbu Tahun 202235

Daftar Gambar

Gambar 10	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut
	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di
	Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 202238
Gambar 11	Perkembangan Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
	Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014-202344
Gambar 12	Perkembangan Tingkat Penganggutan Terbuka (TPT)
	Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014-202346
Gambar 13	Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha
	Pekerjaan Utama di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023
Gambar 14	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Kabupaten Tanah
	Bumbu, Tahun 2018-2023 (Rupiah)57
Gambar 15	Persentase Pengeluaran untuk Makanan dan Bukan
	Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan
	Pengeluaran per Kapita, Tahun 2022 dan 2023 (persen)61
Gambar 16	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas
	Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,
	Tahun 2022 dan 202366
Gambar 17	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas
	Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,
	Tahun 2022 dan 202367
Gambar 18	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Luas
	Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,
	Tahun 2022 dan 202368
Gambar 19	Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas
	Perumahan di Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2022 dan
	202371
Gambar 20	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan
	Utama di Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2022 dan 2023
	72

Gambar 21	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan
	Rumah Tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2022
	dan 202373
Gambar 22	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Bumbu,
	Tahun 2018-202282
Gambar 23	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanah
	Bumbu Tahun 2018-2021 (rupiah)84
Gambar 24	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks
	Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun
	2018-2022

https://anahbumbukab.bps.go.id





https://anahbumbukab.bps.go.id



Pembangunan di suatu negara adalah proses perubahan yang terencana untuk terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian pembangunan sebagai upaya yang sadar dan melembaga yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bagi penduduknya. Di dalam proses tersebut, penduduk berperan sebagai objek sekaligus sebagai subjek, sedangkan pemerintah berperan sebagai pihak yang mengarahkan (steering) dengan berbagai rancangan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Penduduk adalah modal utama di dalam keberhasilan proses pembangunan, namun dapat pula menjadi beban di dalam proses pembangunan itu sendiri. Keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diimbagi dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar dan kualitasnya rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan yang terkait dengan kependudukan hendaknya diarahkan bukan hanya untuk mengendalikan jumlah penduduk, namun juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Hasil yang ingin tercapai tentunya adalah terciptanya penduduk yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Berbicara mengenai kesejahteraan penduduk adalah berbicara mengenai manusia dengan segala kompleksitas di dalamnya, yang terdiri atas banyak komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan mempengaruhi. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan banyak hal, seperti kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, kualitas lingkungan hidup dan sebagainya. Dengan demikian, menjadi penting untuk memandang persoalan penduduk secara holistik (menyeluruh) dengan tidak mengkotak-kotakan persoalan tersebut.

Dalam mewujudkan penduduk yang sejahtera tentunya menghadapi berbagai masalah. Masalah kependudukan tersebut bisa meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk yang merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Permasalahan tersebut menyangkut segala aspek; sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Dalam rangka kependudukan tersebut menghadapi berbagai masalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai data dan informasi kependudukan yang sesuai dengan fakta dinamika kependudukan yang akurat. Saat ini konsentrasi data kependudukan tersebut tidak hanya terbatas pada penyediaan data kuantitas dan dinamika penduduk, tetapi data kependudukan juga digunakan untuk melihat fenomena sosial masyarakat yang semakin berkembang. Untuk itu gambaran mengenai kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan dalam pembangunan, sangat dibutuhkan. Gambaran tersebut meliputi pembangunan pada komponen-komponen sosial yang berpengaruh pada kualitas penduduk seperti bidang pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan. Berdasarkan data kependudukan tersebut, pemerintah maupun pihak lain seperti dunia usaha dapat menyusun berbagai perencanaan, penentuan kebijakan, dan evaluasi hasil pembangunan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan di suatu daerah, harus didasarkan pada kondisi penduduk. Perencanaan pembangunan yang meniadakan variabel penduduk disebut kebijakan yang tidak sempurna, dan kebijakan kependudukan yang tidak dikaitkan dengan pembangunan adalah tidak bermakna. Dengan demikian, semakin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia maka perencanaannya akan semakin mudah dan tepat dalam menyelesaikan masalah kependudukan.

Pada bab kependudukan ini akan diuraikan secara deskriptif dinamika kependudukan Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan rasio jenis kelamin. Selain itu diuraikan pula persebaran dan kepadatan penduduk.

4.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam proses pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan permasalahan kependudukan yang serius jika kurang diantisipasi. Pertumbuhan penduduk harus mampu diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup penduduk. Jika tidak,

akan berpotensi menimbulkan masalah terutama menyangkut kesejahteraan penduduk. Selain itu, perencanaan pada bidang yang merupakan kebutuhan dasar penduduk seperti pendidikan dan kesehatan harus selalu memperhatikan perkembangan jumlah penduduk yang ada.

Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 mencatat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 269.581 orang. Saat itu Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ke-enam di Kalimantan Selatan. Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 berdasarkan hasil proyeksi interim penduduk diestimasikan berjumlah 342.033 orang. Jumlah penduduk ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,14 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022. Angka pertumbuhan ini tergolong tinggi, hal ini wajar mengingat Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten yang masih terus berkembang. Namun, angka pertumbuhan yang tinggi ini tentunya juga memerlukan perhatian khusus, mengingat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menuntut meningkatnya kuantitas dan kulitas fasilitas publik.

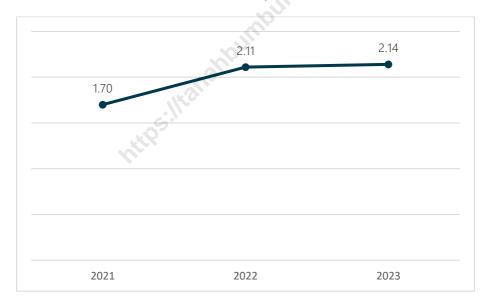
Tabel 1 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk (jiwa)	360.187	322.646	328.146	335.079	342.033
Laki-laki (jiwa)	187.674	165.642	168.407	171.902	175.405
Perempuan (jiwa)	172.513	157.004	159.739	163.177	166.628
Laju Pertumbuhan (persen)	2,42	-	1,70	2,11	2,14
Rasio Jenis Kelamin	108,8	105,50	105,43	105,35	105,27

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 dan Proyeksi Interim 2020-2023 Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu masih berada pada peringkat lima besar di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu sendiri cenderung stabil. Meskipun demikian pertumbuhan penduduknya masih tergolong tinggi (>2 persen). Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dapat menjadi potensi yang besar bagi pertumbuhan kabupaten jika didukung dengan pertumbuhan fasilitas publik, kualitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang memadai pula. Angka pertumbuhan yang tinggi ini juga menjadi indikasi bahwa pesan untuk merencanakan keluarga dengan seksama semakin penting untuk disebarkan secara luas ke masyarakat.

Gambar 1 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2022 (persen)



Sumber: Proyeksi Interim 2021-2023

Penduduk laki-laki di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 diperkirakan berjumlah 175.405 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 166.628 jiwa. Artinya jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2023 masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2023, jika kita membandingkan banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan diperoleh hasil Rasio Jenis Kelamin sebesar

105,27. Angka ini menunjukkan bahwa di setiap 100 orang penduduk perempuan ada 105 – 106 orang penduduk laki-laki di Kabupaten Tanah Bumbu.

4.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penduduk banyak bertempat tinggal di daerah tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi dan tempat dengan sarana dan prasarana sosial yang memadai. Semakin tinggi aktivitas ekonomi di suatu daerah biasanya penduduk akan semakin memadati wilayah tersebut. Sebaliknya wilayah dengan aktivitas ekonomi rendah dan sarana-prasarana yang masih terbatas akan memiliki kepadatan penduduk rendah.

Tabel 2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu menurut Kecamatan Tahun 2023

Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km²)	yah Kepadatan (jiwa/km²)	
(2)	(3)	(4)	
33.776	74,56	453,00	
14.524	214,45	67,73	
26.224	383,91	68,31	
56.822	877,87	64,73	
24.844	195,95	126,79	
11.822	249,73	47,34	
11.04	114,64	96,30	
9.105	1253,51	7,26	
24.018	135,16	177,70	
21.552	201,4	107,01	
82.601	293,48	281,45	
25.705	895,64	28,70	
342.033	4.890,30	68,52	
	(jiwa) (2) 33.776 14.524 26.224 56.822 24.844 11.822 11.04 9.105 24.018 21.552 82.601 25.705	(jiwa) (km²) (2) (3) 33.776 74,56 14.524 214,45 26.224 383,91 56.822 877,87 24.844 195,95 11.822 249,73 11.04 114,64 9.105 1253,51 24.018 135,16 21.552 201,4 82.601 293,48 25.705 895,64	

Sumber: Proyeksi Interim 2023, BPS Kabupaten Tanah Bumbu.

Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu sebagian besar terkonsentrasi di kecamatan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi yaitu Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Satui dan Kecamatan Kusan Hilir. Sekitar 24,15 persen penduduk Kabupaten Tanah Bumbu tinggal di Kecamatan Simpang Empat, dan sekitar 16,61 persen lainnya tinggal di Kecamatan Satui sementara sekitar 9,88 persen penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Kusan Hilir. Ini artinya 50,64 persen penduduk Kabupaten Tanah Bumbu tinggal di ketiga kecamatan ini. Sementara sisanya menyebar di 9 kecamatan lainnya dan Kecamatan Teluk Kepayang adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit (2,66%). Pada tahun 2021, dua kecamatan baru di bentuk, yakni Kecamatan Teluk Kepayang yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Kusan Tengah yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kusan Hilir.

Kepadatan yang ideal untuk suatu wilayah memang sulit untuk ditentukan. Pada umumnya daerah perkotaan yang memiliki kepadatan tinggi rawan terjadi konflik sosial tetapi memudahkan pemerintah dalam membangun fasilitas publik dan akan dapat melayani banyak orang, sedangkan di daerah dengan kepadatan penduduk rendah penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi lebih mahal, selain akses menuju daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit umumnya akan menjadi lebih sulit, karena sulitnya dan mahalnya pembangunan di lokasi-lokasi demikian. Salah satu cara untuk memeratakan persebaran penduduk adalah dengan dengan meningkatkan infrastruktur secara lebih merata sehingga diharapkan bisa menjadi daya tarik masingmasing wilayah. Dengan demikian persebaran penduduk bisa lebih merata dengan kondisi yang seimbang antara penduduk dengan ketersediaan sumber daya.

Kecamatan Kusan Hilir merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 453 jiwa per km² dan Kecamatan Teluk Kepayang dengan kepadatan yang hanya 7-8 jiwa per km² merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan pendud*uk paling rendah*. Padatnya Kecamatan Kusan Hilir ini dikarenakan terjadinya pemekaran kecamatan tersebut menjadi dua kecamatan yaitu, Kusan Hilir dan Kusan Tengah. Hampir 75 persen wilayah asal Kecamatan Kusan Hilir menjadi bagian dari Kecamatan Kusan Tengah. Kecamatan Simpang Empat adalah kecamatan terpadat kedua, hal ini dikarenakan kecamatan ini merupakan pusat kegiatan ekonomi dan didukung dengan fasilitas yang paling lengkap dibandingkan kecamatan lainnya. Tingkat kepadatan daerah perkotaan umumnya lebih tinggi karena menyediakan fasilitas yang lebih lengkap dan beragam serta keberadaan lapangan kerja yang lebih bervariasi dibandingkan daerah pedesaan.

4.3. Komposisi Penduduk

Struktur umur dan jenis kelamin bisa digunakan untuk menggambarkan perkiraan penduduk di masa yang akan datang. Komposisi penduduk suatu daerah menurut umur dan jenis kelamin berkaitan erat dengan berbagai persoalan yang muncul, terutama masalah sosial dan ekonomi. Oleh Karena itu, dalam merencanakan pembangunan pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan struktur umur dan jenis kelamin dari penduduknya. Dengan demikian akan dihasilkan program pembangunan yang tepat guna dan sasaran. Struktur penduduk Kabupaten Tanah Bumbu menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dalam ilmu demografi, terdapat tiga jenis struktur penduduk, yang pertama struktur penduduk muda yang dicirikan dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda, tingkat kelahiran bayi tinggi, dan kelompok usia tua sedikit. Kedua, struktur penduduk stasioner yang menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk sangat lambat. Ketiga, struktur penduduk tua yaitu apabila sebagian besar penduduk suatu negara/wilayah berusia tua yang menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat besar dan tingkat kematian yang sangat kecil.

Tabel 3 Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2022 (jiwa)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	17.717	16.800	34.517
5-9	18.345	17.746	36.091
10-14	16.552	15.495	32.047
15-19	12.006	11.504	23.510
20-24	13.233	13.042	26.275
25-29	14.102	14.556	28.658

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
30-34	14.047	14.236	28.283
35-39	14.367	13.858	28.225
40-44	13.243	12.240	25.483
45-49	11.542	10.469	22.011
50-54	9.404	8.128	17.532
55-59	7.348	6.347	13.695
60-64	5.365	4.754	10.119
65-69	4.044	3.510	7.554
70-75	2.370	2.277	4.647
75+	1.720	1.666	3.386
Jumlah	175.405	166.628	342.033

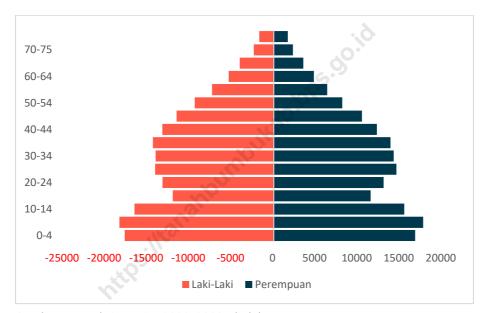
Sumber: Proyeksi Interim 2020-2023

Struktur penduduk muda membutuhkan ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dan selanjutnya lapangan kerja yang cukup untuk mengakomodasi penduduk usia muda tersebut. Sedangkan wilayah dengan struktur penduduk tua harus mengembangkan sistem pensiun dan fasilitas kesehatan yang bagus untuk mengakomodasi mereka. Bagaimanapun juga kesehatan anak, sekolah, lapangan kerja, perumahan dan pelayanan kesehatan memang harus menjadi prioritas pemerintah dalam program pembangunannya.

Seperti halnya laju pertumbuhan penduduk, struktur umur penduduk juga dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Peningkatan fertilitas mempengaruhi jumlah penduduk berusia 0-4 tahun, sementara mortalitas mempengaruhi jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur. Sedangkankan migrasi lebih banyak mempengaruhi kelompok usia dewasa (produktif) karena proses migrasi biasanya didorong oleh alasan ekonomi.

Berdasarkan bentuk piramidanya, struktur penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dapat dikategorikan sebagai struktur penduduk muda, yang dicirikan oleh jumlah penduduk pada kelompok usia muda (15—64 tahun) yang sangat tinggi,

yaitu sekitar 65,47 persen, sedangkan penduduk usia 0—14 tahun hanya sekitar 30,22 persen dari seluruh penduduk dan usia 65+ yang hanya sekitar 4,31 persen. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang lebih tinggi di kelompok umur muda yang disebabkan oleh fertilitas yang cukup tinggi dan migrasi masuk untuk kelompok usia produktif.



Gambar 2 Piramida Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023

Sumber: Proyeksi Interim 2020-2023, diolah

Tabel 4 Komposisi Penduduk (persen) dan Angka Beban Kebergantungan (*Dependency Ratio*) Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023

Tahun	0-14	15-64	65+	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	29,85	66,55	3,59	50,25
2020	30,62	65,54	3,84	52,57

Tahun	0-14	15-64	65+	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2021	30,41	65,52	4,07	52,63
2022	30,22	65,47	4,31	52,74
2023	30,01	65,43	4,56	52,84

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 dan Proyeksi Interim 2020-2023

Tabel di atas menunjukkan struktur penduduk Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 terdiri atas 65,43 persen penduduk usia produktif dan 34,57 persen penduduk yang belum atau tidak produktif. Dengan demikian, Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 adalah sekitar 52,84 yang berarti bahwa terdapat sekitar 52-53 orang penduduk usia belum/tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif atau bisa dikatakan setiap 1 orang tidak produktif ditanggung oleh 2 orang produktif. Ini merupakan indikasi yang bagus, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kelompok usia produktif dan kemungkinan orang tidak produktif terlantar rendah.

Tabel 5 Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu
Menurut Usia Produktif dan Tidak Produktif Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis I	Total	
	Laki-laki	Perempuan	TOtal
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14	30,23	30,20	30,01
15-64	65,39	65,56	65,43
65+	4,38	4,24	4,56
YDR	45,89	45,85	45,87
ODR	7,09	6,83	6,96
RK	52,98	52,68	52,84

Sumber: Proyeksi Interim 2020-2023, diolah

Jika dilihat rasio ketergantungan antara penduduk muda (YDR/Young dependency ratio) dan rasio ketergantungan penduduk tua (ODR/Old dependency ratio) secara umum dapat dikatakan bahwa yang menjadi beban tanggungan penduduk usia produktif sebagian besar adalah penduduk usia muda (0-14 tahun). Hal ini terlihat dari angka YDR yang mencapai 45,87 sedangkan ODR hanya sebesar 6,96. Jika dilihat menurut jenis kelamin rasio ketergantungan penduduk laki-laki di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 adalah 52,98, sedikit lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan penduduk perempuan sebesar 52,68.

4.4. Wanita menurut Usia Perkawinan Pertama

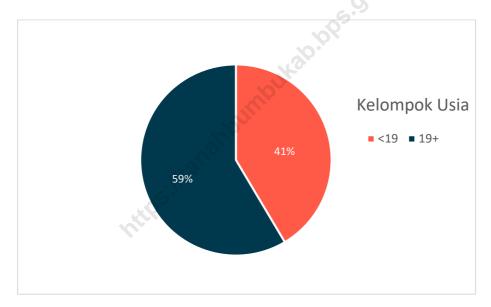
Persoalan pertumbuhan penduduk yang tinggi salah satu pemicu utamanya adalah tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita salah satunya dipengaruhi oleh lamanya masa reproduksinya. Semakin muda seorang perempuan melakukan perkawinan pertama maka semakin panjang masa reproduksinya. Artinya semakin besar juga peluang untuk melahirkan anak selama masa reproduksinya tersebut yang tentu saja akan mempengaruhi tingkat fertilitas. Oleh karena itu, penundaan waktu perkawinan pertama merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah kelahiran anak dikarenakan masa reproduksi yang lebih pendek. Dengan demikian diharapkan jumlah anak yang dilahirkan selama masa reproduksinya dapat dibatasi dan diatur jumlahnya.

Batasan mengenai batas usia minimal seorang wanita dapat menikah sebenarnya sudah diatur dalam hukum formal di Indonesia, pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa usia minimal seseorang dizinkan menikah adalah 19 tahun untuk perempuan. Sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Usia minimal kawin diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sehat dan kuat dimana pada usia tersebut seseorang dianggap sudah siap fisik dan mental. Hal ini untuk menghindari resiko KDRT, kesehatan karena reproduksi yang belum siap, dan terputusnya pendidikan terutama bagi perempuan. Pernikahan dini dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya kehamilan yang tidak dikehendaki, budaya setempat, faktor ekonomi atau faktor pendidikan.

Pada masa sekarang ini dengan kemajuan teknologi, informasi-informasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga sudah semakin disebarluaskan ke masayarakat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya penduduk muda akan pentingnya kedua hal di atas. Grafik di bawah memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 sekitar 41,46 persen penduduk perempuan berusia 10 tahun ke atas dan berstatus pernah kawin, melakukan pernikahan pertamanya pada usia kurang dari 19 tahun.

Gambar 3 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022



Sumber: Susenas 2022, BPS.

Jumlah penduduk perempuan yang menikah pada usia 19 tahun ke atas di Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 58,54 persen. Dapat juga diartikan bahwa 4 dari 10 perempuan 10 tahun ke atas yang pernah kawin di Tanah Bumbu pada tahun 2022 melangsungkan pernikahan pertamanya pada usia kurang dari 19 tahun. Kondisi ini tentu belum seperti yang disarankan oleh BKKBN untuk menikah pada usia ideal yakni 21-25 tahun. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor keterbatasan pendidikan yang dimiliki dan juga masalah ekonomi. Selain itu, rendahnya umur perkawinan pertama bisa jadi dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan

setempat terutama wilayah-wilayah perdesaanadat istiadat yang berlaku di lingkungan setempat terutama wilayah-wilayah perdesaan.

https://anahbumbukab.bps.go.id





https://anahbumbukab.bps.go.id



Kesehatan menjadi salah satu aspek tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu "Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia". Bahkan terdapat salah satu pepatah kesehatan yang sering kita dengar, "Mens sana incopore sano", yang berarti bahwa "Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat". Oleh karena itu, tidak heran jika manusia mengharapkan memiliki tubuh yang sehat agar mempunyai jiwa yang kuat. Pepatah tersebut juga senada dengan pengertian kesehatan sendiri, dimana menurut Undang-Undang, kesehatan dapat diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan merupakan salah satu aspek kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu fokus penting di dalam pembangunan. Pembangunan di bidang ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat secara mudah, murah dan merata di seluruh wilayah. Masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang baik menandakan kualitas sumber daya manusia di masyarakat tersebut sudah cukup baik. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin baik dalam mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Derajat kesehatan juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu daerah dimana daerah dengan sistem pelayanan kesehatan yang baik lebih aman dari ancaman kemiskinan.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan agar tujuan yang diharapkan yaitu pelayanan kesehatan yang mudah, murah, dan merata dapat tercapai. Penyediaan fasilitas kesehatan pokok seperti puskesmas maupun puskesmas pembantu menjadi hal yang mutlak untuk dipenuhi. Selain itu, pemerintah juga mendirikan Poskesdes di hampir seluruh wilayah karena ini bisa lebih menjangkau masyarakat terutama yang berada jauh dari pusat kecamatan. Penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terdistribusi merata juga terus dilakukan untuk mempermudah akses

masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan bagi masyarakat dengan harapan akan dapat menurunkan angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan dan gaya hidup sehat juga terus dilakukan oleh pemerintah terlebih dalam era teknologi informasi seperti sekarang ini. Memasyarakatkan budaya hidup sehat dengan berbagai media yang ada ini menjadi lebih penting karena selain mencegah lebih baik daripada mengobati juga akan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga kemungkinan penyakit akan menyerang juga akan lebih kecil.

Pemerintah sangat serius dalam pembangunan di bidang kesehatan dengan terus meningkatkan anggaran untuk bidang kesehatan. Usaha untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat diwujudkan dengan meluncurkan berbagai jaminan sosial bidang kesehatan bagi kelompok masyarakat bawah. Program pelayanan kesehatan gratis diberikan bagi kelompok masyarakat miskin melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang sekarang sedang menuju ke arah jaminan sosial nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Targetnya pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Seluruh pelayanan ini tak lain bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan salah satunya dapat diukur dengan berbagai indikator bidang kesehatan. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa indikator kesehatan diantaranya Angka Harapan hidup, Angka Kesakitan dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter, klinik, puskesmas dan lainnya. Fenomena lain yang berkaitan dengan kesehatan dan ikut berpengaruh pada kualitas kesehatan adalah usia kawin pertama wanita pernah kawin, fertilitas, serta penggunaan alat/cara KB oleh penduduk wanita berusia 15-49 tahun pernah kawin di Kabupaten Tanah Bumbu.

4.5. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Indikator yang biasa digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka harapan hidup (AHH). Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai jenis indikator diantaranya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, Angka Kesakitan (Morbiditas), dan Rata-rata lama sakit, dari kebiasaan hidup sehat penduduknya dan dari aspek sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Sebagai salah satu indikator kesehatan, angka harapan hidup digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia, yang dianggap sebagi cermin dari dimensi sehat dan berumur panjang. Angka harapan hidup pada waktu lahir (e°) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu.

Gambar 4 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, Angka Harapan Hidup (AHH) Tanah Bumbu tercatat 70,7 tahun yang berarti rata-rata umur penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang mungkin dicapai dari sejak lahir hingga meninggal dunia sekitar 70- 71 tahun. Sedangkan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan pada angka yang lebih muda, yakni sekitar 68-69 tahun.

Angka harapan hidup pada tahun 2023 ini sedikit meningkat dibanding tahun 2022, yakni sebesar 70,94 tahun dari 70,70 tahun, ini tentu tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang terus meningkatkan perhatian terhadap kualitas kesehatan warganya. Berbagai program dan peralatan medis semakin dikembangkan dari waktu ke waktu. Program satu desa satu bidan serta larangan melahirkan tanpa didampingi tenaga kesehatan ditengarai mampu meningkatkan angka harapan hidup saat lahir. Meskipun sejak 2020 Kabupaten Tanah Bumbu, seperti daerah-daerah lainnya, harus menghadapi pandemic Covid-19, namun kualitas kesehatan secara umum masih dapat dipertahankan dalam tingkatan yang baik. Dengan penerapan protokol kesehatan, serta kesiapan dan kesigapan fasilitas kesehatan yang ada, terutama rumah sakit daerah dalam penanganan pasien.

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Tanah Bumbu berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Ini merupakan indikasi bahwa pembangunan manusia di bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu lebih baik dibandingkan provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu yang telah berjalan dengan baik hendaknya dapat dipertahankan seperti pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan dasar gratis di fasilitas kesehatan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Angka Harapan Hidup biasa untuk melihat derajat kesehatan. Sementara itu, untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai jenis indikator diantaranya Angka kesakitan (morbiditas).

Tabel 6 Angka Morbiditas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Rincian	Laki-laki	Perempuan	Kabupaten Tanah Bumbu
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Morbiditas (persen)	11,13	10,58	10,86
Angka Keluhan Kesehatan	32,62	33,54	33,07

Sumber: Susenas 2022, BPS.

Angka Morbiditas (kesakitan) merujuk pada konsep yang digunakan BPS dalam Susenas menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll.

Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit). Hasil Susenas 2022 menunjukkan Angka Morbiditas penduduk Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 11,13 persen atau menurun 0,09 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 11,22 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka kesakitan penduduk laki-laki (11,13 persen) lebih tinggi daripada angka kesakitan penduduk perempuan (10,58 persen). Sedangkan dari angka keluhan kesehatan, perempuan sedikit lebih tinggi dari laki-laki dimana angka keluhan kesehatan perempuan sebesar 33,54 persen sementara laki-laki 32,62 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa persentase penduduk perempuan yang memiliki gangguan pada kondisi fisik sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

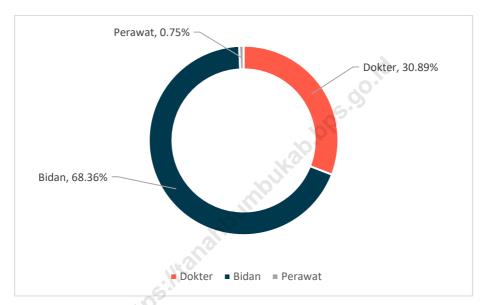
4.6. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Kesehatan balita ditentukan bahkan saat ia baru dilahirkan. Tidak hanya kesehatan ibu tetapi juga oleh penolong persalinan sang ibu. Kesehatan maternal sangat penting karena kualitas ibu hamil dan kualitas penolong persalinan akan menentukan kualitas bayi yang dikandungnya. Selain itu, salah satu kunci utama dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan bayi saat proses melahirkan adalah dengan adanya tenaga terlatih sebagai penolong persalinan. Tenaga kesehatan terlatih yang dimaksud seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

Masalah kesehatan dalam persalinan ini cukup komplek dikarenakan masih cukup kentalnya faktor sosial budaya selain faktor klinis. Salah satu contoh nyata adalah masih banyaknya ibu hamil yang memilih tenaga non medis sebagai penolong persalinan. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah melalui program bidan desa untuk memperluas akses masyarakat ke bidan, gratis biaya persalinan bagi penduduk golongan kurang mampu dan program lainnya. Selain itu, juga mengedukasi ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan

kehamilan secara rutin ke tenaga kesehatan dan gaya hidup sehat selama masa kehamilan.

Gambar 5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir dan Penolong Kelahiran Terakhir Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022



Sumber: Susenas 2022, BPS.

Berdasarkan hasil Susenas 2022, mayoritas para ibu melahirkan sudah menggunakan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinannya, dari seluruh perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah melahirkan sebanyak 99,25 persen diantaranya dibantuk melahirkan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang paling banyak digunakan adalah bidan. Tenaga bidan memang paling terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat karena selain jumlahnya banyak dan menyebar juga biaya lebih terjangkau dibanding tenaga kesehatan dokter kandungan atau dokter umum.

4.7. Penggunaan Alat/Cara KB

Keluarga Berencana merupakan salah satu wujud nyata usaha pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk dengan tujuan menekan laju pertumbuhan penduduk, mengatur jumlah anak, jarak kelahiran anak, serta

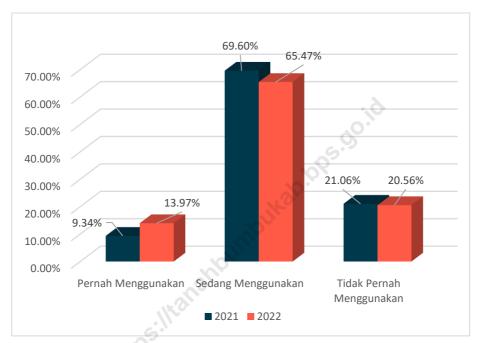
menekan angka kematian ibu. Dengan demikian, selain membatasi jumlah kelahiran juga akan dihasilkan kelahiran yang sehat dengan adanya pengaturan jarak kelahiran. Program ini telah dilaksanakan bahkan sejak era orde baru dimana pada saat itu merupakan masa dimana program ini sangat memasyarakat.

Program ini dilakukan dengan penggunaan alat/cara KB dengan berbagai macam/jenisnya. Cakupan akseptor KB diharapkan terus meningkat terutama kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implant. Cakupan KB yang meningkat diharapkan dapat mempercepat usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk, Sejalan dengan salah satu konsep Beyond Family Planning yang menyatakan bahwa apabila program KB dikelola dengan baik, maka fertilitas akan dapat diturunkan. Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, jumlah penduduk perempuan dan jumlah penduduk usia subur merupakan indikator yang berkaitan erat dengan tingkat fertilitas. Oleh sebab itu, program KB ditujukan pada kelompok penduduk tersebut.

Pelaksanaan program KB di Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan saat ini masih berlangsung dan berjalan dengan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya perempuan pernah kawin usia subur yang menggunakan alat/cara KB. Pada tahun 2022 sebanyak 65,47 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun sedang menggunakan KB, persentase ini menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 69,60 persen. Sementara itu, sekitar 20,56 persen perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun tidak pernah menggunakan alat/cara KB pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020 sebanyak 21,06 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan usia subur sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana ini.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (reversible) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keputusan seseorang untuk memilih menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, harga, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisiensi, minim resiko kegagalan serta tingkat kenyamanan bagi penggunanya.

Gambar 6 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49
Tahun ke Atas menurut Partisipasi Penggunaan Alat/Cara KB di
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2022



Sumber: Susenas 2021-2022, BPS.

Program KB menyediakan berbagai alat/cara KB yang ditujukan untuk perempuan maupun laki-laki, namun pada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu hampir semua alat/cara KB digunakan oleh perempuan. Sebagian besar Pengguna KB di Kabupaten Tanah memilih cara KB berupa pil dan suntik dari berbagai macam cara/alat yang disediakan. Ada banyak pertimbangan yang digunakan oleh masyarakat dalam menentukan keikutsertaannya dalam KB dan jenis alat/cara KB apa yang akan dipakai. Faktor pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh pasangan usia subur, faktor jumlah anak yang diinginkan, faktor proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga, dan faktor kemudahan serta biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap jenis alat/cara KB. Tentu saja juga muncul kekhawatiran oleh beberapa bagian masyarakat akan efek samping yang mungkin muncul dalam penggunaan alat KB.

26





https://anahbumbukab.bps.go.id



Pendidikan bersama dengan kesehatan termasuk dalam investasi dalam pembangunan. Keduanya bahkan saling melengkapi dan berkaitan dalam pembangunan. Todaro dan Smith (2006) menyebutkan bahwa pendidikan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan. Dalam hukum trade off keuangan dan pengambilan keputusan untuk melanjutkan sekolah, tergambar bahwa lulusan pendidikan tinggi mempunyai pendapatan (return) yang lebih tinggi dibandingkan pendidikan di bawahnya. Oleh karena itu, tidak sedikit pemerintah mencanangkan program-program guna meningkatkan kualitas pendidikan rakyatnya seperti Kartu Indonesia Pintar, Program Wajib Belajar, dan sebagainya. Selain itu pendidikan juga termasuk dalam salah satu indikator SDGs (Sustainable Development Goals) yang harus diupayakan.

Pendidikan sendiri diartikan sebagai usaha manusia untuk menambah ilmu pengetahuannya. Dalam hal ini dapat dicapai melalui bangku sekolah. Pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu. Semakin baik tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin baik pula kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan pembangunan dalam bidang pendidikan adalah tersedianya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.

Peranan pendidikan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia sangatlah besar sehingga pembangunan di bidang pendidikan harus menjadi prioritas paling utama. Selain itu pendidikan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 tanpa memandang status ekonomi, sosial, suku maupun agama. Pembangunan bidang pendidikan yang baik akan menghasilkan pemerataan dan peningkatan mutu sumber daya manusia sehingga memiliki kemampuan dalam rangka menjalankan pembangunan.

Pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu pada khususnya masih memiliki beberapa tantangan yang serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa diantaranya adalah pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, tata kelola pendidikan dan masalah pembiayaan. Wilayah

yang luas menjadi tantangan utama dalam usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu usahanya adalah meningkatkan jumlah sekolah agar lebih mudah dijangkau oleh penduduk usia sekolah mengingat sangat minimnya sarana transportasi umum di Kabupaten Tanah Bumbu.

Potret atau kondisi pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan sebagai bahan evaluasi pembangunan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan indikatorindikator yang digunakan sebagai pendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan yang efektif dan efisien. Beberapa indikator yang digunakan ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan antara lain Angka Melek Huruf, Partisipasi Sekolah dan Tingkat Pendidikan.

4.8. Kemampuan Membaca dan Menulis

Dalam era globalisasi yang sudah maju seperti ini, kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis sudah menjadi suatu keharusan. Pada era ini segala sesuatu seperti informasi ataupun teknologi sudah dapat diakses dengan mudah. Oleh karena itu, agar mampu mengikuti era globalisasi ini diharapkan tidak ada lagi penduduk khususnya penduduk Tanah Bumbu yang berumur 15 tahun ke atas yang masih tidak melek huruf.

Melek huruf sendiri dapat diartikan sebgai kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan membaca dan menulis merupakan kebutuhan mendasar bagi penduduk agar dapat hidup berkecukupan karena memiliki peluang kerja yang lebih baik. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya.

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatan yang memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Angka melek huruf digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Tabel 7 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Jenis Kelamin	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
		6,-	
Laki-laki	99,19	79,17	3,64
Perempuan	97,23	79,33	2,86
		70.07	
Tanah Bumbu	98,24	79,25	3,26

Sumber: Susenas 2022, BPS.

Angka kemampuan baca tulis merupakan besarnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf lain/alfabet (a-z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (huruf jawa, kanji, dll). Pada tahun 2022 di Kabupaten Tanah Bumbu 98,24 persen penduduk mampu membaca dan menulis huruf latin, persentase tertinggi ada pada jenis kelamin laki-laki, dimana 99,19 persen penduduk laki-laki berusia 15 tahun keatas mampu membaca dan menulis huruf latin. Selain huruf latin, 79,25 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas di Tanah Bumbu mampu membaca dan menulis dengan huruf arab/hijaiyah. Terdapat 3,26 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf lainnya, umumnya berupa huruf jawa. Secara umum kemampuan baca tulis untuk berbagai huruf antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda begitu jauh.

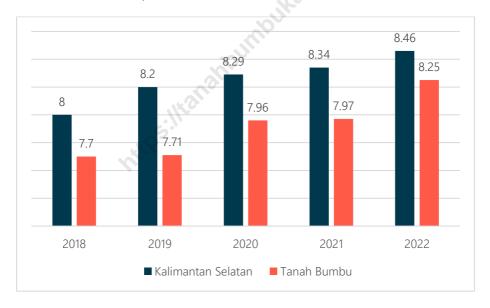
4.9. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan level pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dijalani oleh penduduknya. Lama sekolah dikonversi berdasarkan tingkat pendidikan yang diselesaikan, namun

tidak termasuk tahun tidak naik kelas. Setiap level pendidikan yang ditamatkan dan yang telah dijalankan oleh seseorang akan dikonversi ke dalam satuan tahun lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 (sembilan) tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12. Begitu seterusnya hingga pendidikan tinggi. Perhitungan lama sekolah di sini, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Jadi meskipun seorang anak lulus SD namun pernah tidak naik kelas sebanyak 2 kali, akan tetap diperhitungkan lama sekolahnya selama 6 (enam) tahun.

Gambar 7 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018-2022 (tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Rata-rata lama sekolah penduduk Tanah Bumbu pada tahun 2022 mencapai 8,25 tahun. Angka ini berarti bahwa secara rata-rata penduduk Tanah Bumbu yang telah berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 atau 3 SMP/sederajat. Angka ini mulai menyusul angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 8,46 tahun. Secara umum,

penduduk 25 tahun ke atas di Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan sudah menamatkan kelas 2 atau 3 SMP/sederajat.

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah memang tidaklah mudah karena yang diukur adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Artinya, rata-rata lama sekolah ini merupakan angka yang sudah terjadi sebelumnya. Namun, berbagai upaya untuk meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah tentu tetap harus menjadi perhatian. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Pemerintah daerah bisa meningkatkan peluang agar penduduk-penduduk yang rentan putus sekolah seperti usia 6 SD atau usia 3 SMP agar bisa tetap melanjutkan bersekolah melalui pemberian penyuluhan kepada sekolah-sekolah maupun pendidikan kepada orang tua sendiri. Selain itu juga bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan dan mempermudah akses penduduk ke sekolah-sekolah, terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, karena tak jarang faktor yang menyebabkan putus sekolah adalah jauhnya jarak tempuh ke sekolah.

4.10. Partisipasi Sekolah

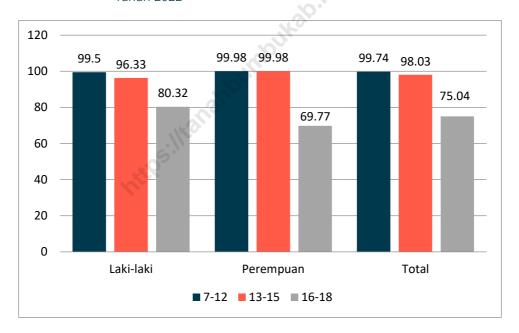
Untuk mengetahui kondisi pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu lebih lanjut berikut disajikan indikator partisipasi sekolah lainnya yaitu, APS (Angka Partisipasi Sekolah/Enrollment Ratio) dan APM (Angka Partisipasi Murni/Net Enrollment Ratio) dalam tabel yang berbeda.

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran untuk menghitung daya serap institusi pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin tingginya penduduk usia sekolah yang bersekolah. Angka ini sangat dipengaruhi oleh populasi penduduk usia sekolah sehingga fasilitas pendidikan yang ada harus bisa mengimbangi pertambahan jumlah penduduk usia sekolah yang terus meningkat setiap tahunnya. Jika tidak, bukan tidak mungkin APS akan semakin rendah dikarenakan tidak mampunya institusi pendidikan menyerap penduduk usia sekolah.

Indikator angka partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengukur proporsi keikutsertaan anak pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin meningkatnya akses penduduk pada fasilitas pendidikan yang ada baik milik pemerintah maupun swasta.

APS adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah dalam suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Kelompok umur tersebut telah disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yakni umur 7-12 tahun untuk SD/sederajat, 13-15 tahun untuk SMP/sederajat, dan 16-18 tahun untuk SMA/sederajat. Meskipun menggunakan kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan, namun APS dihitung tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Misalnya untuk APS pada kelompok umur 7-12 tahun adalah proporsi semua anak umur 7-12 tahun yang masih sekolah (baik yang masih SD/sederajat maupun yang telah SMP/sederajat) terhadap total anak berumur 7-12 tahun.

Gambar 8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal+Non Formal menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022



Sumber: Susenas 2022, BPS.

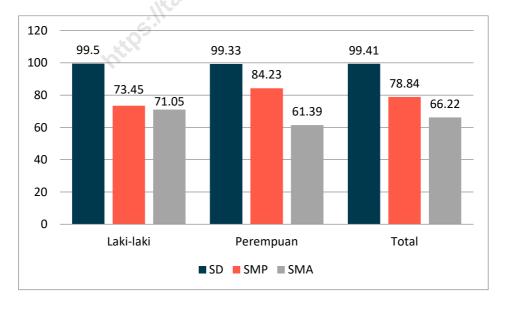
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tanah Bumbu seperti terlihat dalam gambar di atas sudah sangat tinggi untuk kelompok umur 7-12 dan 13-15 tahun atau pada jenjang SD dan SMP sederajat. Semakin bertambahnya usia sekolah semakin rendah pertisipasi sekolahnya seperti terlihat pada gambar di atas. Hal ini terlihat dari angka partisipasi sekolah yang semakin rendah pada kelompok usia lebih tua. APS pada jenjang usia 16-18 atau usia SMA hanya mencapai

75,04 persen. Ini artinya dari 100 orang anak usia 16-18 di Kabupaten Tanah Bumbu hanya 75-76 orang anak yang masih bersekolah.

Angka APS 16-18 tahun perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tercatat APS Perempuan 16-18 tahun sebesar 69,77 sedangkan APS Laki-laki 16-18 tahun sebesar 80,32. Disparitas ini kemungkinan terjadi karena anak perempuan umumnya dirasa tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi, selain itu beban memiliki pekerjaan biasanya dibebankan pada laki-laki, sehingga perempuan dianggap tidak perlu memiliki pendidikan tinggi yang akan memudahkan untuk mencari pekerjaan.

Selain APS, indikator berikutnya untuk melihat partisipasi penduduk dalam pendidikan adalah APM. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan banyaknya anak yang sekolah di luar sistem pendidikan, seperti menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu dan lulus lebih awal.

Gambar 9 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal+NonFormal menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022



Sumber: Susenas 2022, BPS.

Berbeda dengan APS, APM dihitung dengan melihat jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Misalnya untuk APM SD adalah proporsi semua anak umur 7-12 tahun yang masih sekolah SD/sederajat terhadap total anak berumur 7-12 tahun (anak yang telah SMP/sederajat pada usia 7-12 tahun tidak termasuk dalam perhitungan APM SD).

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tanah Bumbu seperti terlihat dalam gambar di atas sudah tinggi untuk kelompok umur 7-12 pada jenjang SD, hampir seluruh anak berusia 7 – 12 tahun berada pada jenjang sekolah SD. Sementara untuk jenjang SMA masih cukup rendah dengan hanya mencapai 66,22 persen. Ini artinya dari 100 orang anak usia 16-18 di Kabupaten Tanah Bumbu ada sekitar 66-67 orang anak yang masih bersekolah pada jenjang SMA, selebihnya bersekolah di jenjang selain setingkat SMA atau tidak bersekolah.

Berdasarkan kedua gambar sebelumnya yang berisi tentang tingkat pastisipasi sekolah masing-masing jenjang pendidikan, dapat kita simpulkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 mengalami penurunan seiring kenaikan jenjang pendidikan.

Kabupaten Tanah Bumbu sendiri sekarang ini sedang dalam upaya mengurangi angka putus sekolah melalui upaya meringankan biaya pendidikan dengan pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Namun, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Biaya pendidikan terbesar bukanlah terkonsentrasi pada biaya/iuran sekolah, biaya buku, maupun biaya ujian. Biaya yang menyangkut akomodasi siswa sehari-hari lah yang lebih memberatkan orang tua siswa, seperti uang saku dan uang transport sehari-hari yang harus dikeluarkan setiap anak berangkat sekolah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan pula memberikan perhatian terhadap akomodasi transportasi yang diperlukan siswa, terutama untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA yang tidak mungkin setiap desa mempunyai sekolah. Misalnya dengan pengadaan bus sekolah yang murah untuk masing-masing desa yang tugasnya mengantar dan menjemput anak-anak di desa tersebut menuju ke dan pulang dari tempat sekolahnya. Sehingga diharapkan dengan adanya sarana tersebut, mampu menumbuhkan motivasi pada diri anak untuk sekolah lebih tinggi dan tinggi.

4.11.Tingkat Pendidikan

Selain tingkat partisipasi sekolah, salah satu indikator yang sering dipergunakan sebagai salah satu ukuran dari tingkat kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai

pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 8 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

ljazah Tertinggi yang Dimiliki	Laki-Laki	Perempuan	Tanah Bumbu
(1)	(2)	(3)	(4)
SD Sederajat ke bawah SMP Sederajat SMA Sederajat SMK/MAK Perguruan Tinggi	37,31 25,34 22,44 7,10 7.81	44.17 25.16 14.81 5.51 10.35	40.64 25.25 18.74 6.33 9.04
Total	100,00	100,00	100,00

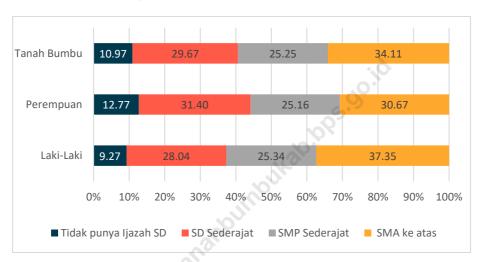
Sumber: Susenas 2022, BPS.

Pendidikan juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Secara sederhana peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dibarengi oleh pemerataan pendapatan. Banyak fakta yang menunjukan bahwa negara yang memprioritaskan pembangunan pendidikan tumbuh lebih cepat dibandingkan negara yang kurang memperhatikan masalah pendidikan.

Tamat pada jenjang pendidikan adalah selesai mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu jenjang sekolah hingga akhir, dengan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah baik pada sekolah negeri maupun swasta. Ijazah/STTB yang dimiliki dianggap hal yang mencerminkan taraf intelektualitas penduduk.

Pada daerah-daerah yang sudah relatif maju rata-rata penduduknya memilki ijazah yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang masih terbelakang.

Gambar 10 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022



Sumber: Susenas 2022, BPS.

Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tanah Bumbu seperti terlihat dalam tabel di atas sekitar 15,78 persen penduduk di Tanah Bumbu tidak/belum memiliki ijazah SD. Angka ini merupakan gabungan dari masyarakat yang masih bersekolah SD, masyarakat yang belum pernah bersekolah, serta masyarakat yang putus sekolah saat SD. Sementara penduduk yang pendidikannya SMA ke atas sebesar 31,89 persen. Terlihat penduduk laki-laki yang memiliki ijazah SMA ke atas lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Dengan semakin meningkatnya sarana dan prasarana yang disediakan serta berbagai keringanan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang tinggi.

.

BAB 4 KETENAGAKERJAAN

https://anahbumbukab.bps.go.id



Data dan informasi ketenagakerjaan merupakan pendukung yang perlu dan penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan sendiri merupakan salah satu komponen utama penggerak roda pembangunan perekonomian. Dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja, diperlukan perencanaan mengenai tenaga kerja yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. Tenaga kerja, sebagai salah satu faktor produksi memiliki ciri diantaranya jika sering dipakai maka jumlahnya tidak akan hilang atau berkurang, bahkan nilainya menjadi semakin tinggi.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan problematika yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Secara umum, masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Bumbu tidak jauh berbeda dengan permasalahan ketenagakerjaan di wilayah lain. Permasalahan itu berkaitan dengan tingkat pengangguran, jumlah jam kerja, dan ketidakmerataan penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor lapangan usaha. Akibatnya, beberapa sektor ketenagakerjaan yang potensial belum berkembang secara optimal. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut, perlu disusun kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang terpola dan terpadu.

Kabupaten Tanah Bumbu adalah kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten ini sebagian besar disebabkan oleh migrasi. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya daya tarik Kabupaten Tanah Bumbu bagi para pencari kerja sebagai tempat beradanya lokasi pertambangan batu bara dan perkebunan sawit. Banyaknya tenaga kerja yang tersedia di Tanah Bumbu tentunya menjadi tantangan

tersendiri agar tidak menimbulkan problematika ketenagakerjaan yang lebih besar.

Dengan mengetahui kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah, seperti seberapa banyak angkatan kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja, kualitas yang diukur dengan pendidikan tenaga kerja, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dan situasi ketenagakerjaan lainnya, dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT menurut tingkat pendidikan, serta persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha. Indikator-indikator tersebut bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik

4.12. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Berdasarkan usianya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja (0—14 tahun). Penduduk usia kerja juga dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengelompokan ini berdasarkan pada jenis kegiatan utama yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Penduduk yang dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja adalah penduduk yang beraktivitas sekolah, mengurus rumah tangga, dan penduduk yang sudah tidak mampu bekerja, baik karena alasan kesehatan atau usia (misalnya pensiunan dan penerima pendapatan). Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi atau ingin terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang aktif berusaha mencari pekerjaan (pengangguran).

Besarnya angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja. Namun besarnya penawaran belum tentu sebanding dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja. Akibatnya, akan ada angkatan kerja yang tidak/belum terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia atau yang disebut dengan pengangguran. Pengangguran tidak selalu berkorelasi positif dengan kemiskinan, namun penanganan terhadap tenaga kerja yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan ini perlu mendapat perhatian khusus. Tanpanya, tidak menutup kemungkinan hal itu akan menimbulkan berbagai masalah seperti kerawanan sosial

Tabel 9 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Angkatan Kerja (TPAK)	91,06	45,01	68,57	
Bekerja	93,15	94,07	93,44	
Pengangguran (TPT)	6,85	5,93	6,56	
Bukan Angkatan Kerja	8,94	54,99	31,43	

Sumber: Sakernas Agustus 2023, BPS

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan dibandingkan total seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas. TPAK dapat memberikan indikasi seberapa besar potensi ekonomi suatu negara, seberapa besar tenaga kerja yang dapat terlibat dalam kegiatan produkti, dan membantu perencanaan kebijakan ketenagakerjaan.

TPAK Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 mencapai 68,57 persen. TPAK penduduk laki-laki mencapai 91,06 persen, mencapai dua kali lipat dari penduduk perempuan yang hanya sebesar 45,01 persen. Laki-laki, umumnya menjadi pihak yang lebih sering mendapat beban tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, ini menjadi salah satu penyebab TPAK laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Dilihat dari perkembangannya TPAK Kabupaten Tanah Bumbu cukup berfluktuatif seperti terlihat dalam gambar di bawah. TPAK Tanah Bumbu sempat mengalami penurunan yang cukup besar, hingga hanya mencapai 61,15 persen pada tahun 2014, kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 67,08 persen. Pada 2020, TPAK Tanah Bumbu sempat mencapai 70,16 persen. TPAK ini meningkat saat masyarakat harus melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi yang ada, termasuk masyarakat yang normalnya tidak bekerja namun kemudian harus bekerja juga untuk mencukup kebutuhan karena adanya pandemi Covid-19.

Pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dibanding tahun sebelumnya yakni menjadi 68,57 persen, dari tahun sebelumnya 64,75. Dari persentase TPAK tersebut, 93,44 persen diantaranya berstatus bekerja. Status bekerja, baik pada laki-laki maupun perempuan cukup setara, ini menunjukkan secara umum tenaga kerja perempuan lebih sedikit daripada tenaga kerja laki-laki, namun bagi perempuan yang memutuskan untuk bekerja, potensi untuk mendapatkan pekerjaan cukup tinggi.

Gambar 11 Perkembangan Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014-2023



Sumber: Sakernas Agustus 2023, BPS

Tingkat TPAK dan status bekerja yang tinggi ini merupakan indikasi awal perekonomian yang baik. Namun, untuk mengetahui secara lebih tepat dan rinci mengenai ketenagakerjaan diperlukan adanya penelitian yang lebih rinci, seperti kategori lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, apakah pekerja bekerja pada sektor informal atau formal, tingkat keamanan dan keselamatan pada lapangan usaha, pendidikan tenaga kerja, dan status migrasi para pekerja

4.13. Tingkat Pengangguran

Masalah pengangguran merupakan salah satu yang menjadi perhatian dalam isu ketenagakerjaan. Kondisi ini terjadi akibat dari ketidakmampuan pasar dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia atau adanya ketidakcocokan antara pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan usaha.

Kondisi ekonomi yang tidak berkembang biasanya mengakibatkan berkurangnya permintaan tenaga kerja sehingga banyak angkatan kerja tidak terserap. Kondisi ekonomi yang baik pun masih bisa menyebabkan masalah pengangguran, jika kualifikasi tenaga kerja yang dicari oleh lapangan usahatidak sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia. Untuk kondisi di Tanah Bumbu, beberapa perusahaan mencari sendiri tenaga kerja yang diperlukan dari daerah-daerah luar, sehingga daya serap tenaga kerja bagi penduduk Tanah Bumbu sendiri tidak maksimal. Selain itu minimnya kesadaran berwirausaha terutama bagi angkatan kerja muda turut berkontribusi pada banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pasar.

Dalam bahasan ini yang termasuk penganggur adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang pada saat pencacahan tidak bekerja, tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers), serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (future starters). Perbandingan jumlah pengangguran yang dimaksud terhadap jumlah penduduk angkatan kerja dikenal dengan istilah pengangguran terbuka (open unemployment).

Gambar 12 Perkembangan Tingkat Penganggutan Terbuka (TPT)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014-2023



Sumber: Sakernas, BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 sebesar 6,56 persen, sedikit menurun dibanding tahun 2022 sebesar 6,89 persen. Wilayah Tanah Bumbu dikenal sebagai magnet bagi para pekerja pendatang dari luar wilayah karena banyak perusahaan yang berada disini sehingga persaingan antar pencari kerja juga cukup tinggi, ditambah lagi perusahaan yang mencari sendiri tenaga kerja dari luar daerah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2023 TPT laki-laki lebih tinggi dibanding TPT perempuan, yakni terdapat 6,85 persen laki-laki yang menganggur dari seluruh angkatan kerja laki-laki, sementara terdapat 5,93 persen perempuan yang menganggur dari seluruh angkatan kerja perempuan. Hal ini beranding terbalik dengan tahun 2022, dimana terdapat TPT perempuan, 7,48 persen perempuan lebih tinggi daripada TPT laki-laki, yakni 6,62 persen. Selain keberadaan perusahaan-perusahaan yang juga menerima pekerja perempuan, maraknya usaha *online* dalam beberapa tahun terakhir ikut mendorong turunnya angka TPT perempuan, dimana usaha ini lebih mudah untuk dimulai dan dikelola oleh perempuan yang juga menjadi ibu rumah tangga. Angka ini mengindikasikan sejalan dengan semakin banyaknya perempuan yang masuk

ke dunia kerja, maka akan terjadi persaingan yang dapat menyebabkan menurunnya jumlah laki-laki bekerja.

Tabel 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 (persen)

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,85	5,93	6,56

Sumber: Sakernas Agustus 2023, BPS

Pada problematika pengangguran, selain isu ketidakseimbangan antara jumlah lowongan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Perlu diperhatikan pula adanya ketidakseimbangan antar latar belakang pendidikan atau keahlian yang dimiliki dengan lowongan yang tersedia. Tenaga kerja umumnya memiliki ekspektasi akan mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, sementara mereka yang berijazah rendah kesulitan mencari pekerjaan yang menawarkan upah yang layak. Beberapa tenaga kerja enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan, terdapat pula tenaga kerja yang mengalami kesulitan jika harus bekerja tidaks esuai dengan keahlian atau pendidikannya sehingga akhirnya menganggur karena ketidaksesuaian lapangan usaha yang tersedia.

Pada tahun 2023, angkatan kerja dengan pendidikan terakhir SMA merupakan kelompok dengan TPT paling tinggi dibanding kelompok pendidikan lainnya. Sebagaimana dikemukakan di atas masalah ketidakcocokan jenis pekerjaan dengan keinginan menjadi salah satu penyebab utama. Untuk tenaga kerja lulusan SMA yang baru lulus terdapat pula yang sengaja mengambil *gap year*, atau ingin mencari pekerjaan namun kesulitan karena belum pernah bekerja sebelumnya.

Tabel 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan tingkat Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 (persen)

Pendidikan Tertinggi	Bekerja	Menganggur (TPT)
(1)	(2)	(3)
<= SD	96,31	3,69
SMP dan sederajat	89,51	9,04
SMA Umum dan sederajat	88,95	11,05
SMK	93,74	6,26
Perguruan Tinggi	98,21	2,10

Sumber: Sakernas Agustus 2023, BPS

Demikian juga berlaku untuk angkatan kerja lulusan perguruan tinggi, adanya pengangguran lebih kepada ketidakcocokan antara lapangan kerja yang ada dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Pada kelompok ini rata-rata masih memilih jenis pekerjaan menyesuaikan kemampuan dan ijazah yang dimiliki meskipun sebenarnya banyak lapangan kerja yang tersedia tanpa perlu keahlian khusu. Keengganan ini menyebabkan meskipun ada lapangan pekerjaan, namun tidak sesuai dengan ekspetasi, baik dari segi keahlian ataupun pendapatan, mereka cenderung akan mencari pekerjaan lain atau menganggur sampai ada kesempatan pekerjaan sesuai keinginan mereka.

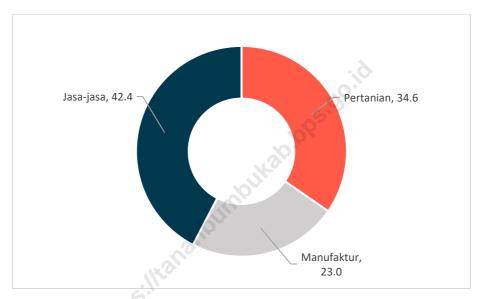
4.14. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Seseorang dapat memiliki lebih dari satu pekerjaan yang dibedakan menjadi pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan. Pekerjaan utama adalah pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak, namun apabila dua pekerjaan atau lebih menggunakan waktu yang sama maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar.

Lapangan usaha di sektor jasa menyerap lebih dari setengah total pekerja di Tanah Bumbu. Ini mengindikasikan semakin berkembangnya sektor tersier, yakni jasa, dibandingkan sektor pertanian serta sektor manufaktur. Kategori pada sektor jasa yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah kategori perdagangan dan akomodasi dan penyediaan makan minum. Usaha-usaha

pada kategori ini umumnya merupakan usaha padat karya sehingga memerlukan banyak tenaga kerja, dibandingkan dengan misalnya perusahaan pertambangan yang merupakan usaha padat modal.

Gambar 13 Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023



Sumber: Sakernas Agustus 2023, BPS Kabupaten Tanah Bumbu

Kedudukan seseorang di dalam pekerjaannya dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Kedudukan sebagai berusaha, baik sendiri maupun dibantu oleh buruh, merupakan bentuk pekerjaan yang menanggung resiko secara ekonomi seperti tidak kembalinya modal dan mendapatkan laba/rugi.

Tabel 12 Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	22,25	26,28	23,55
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/	7,26	8,53	7,67
tak dibayar		90.	
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3,15	2,55	2,96
Buruh/karyawan/pegawai	56,81	42,78	52,28
Pekerja bebas	7,50	1,08	5,43
Pekerja keluarga/tak dibayar	3,02	18,78	8,11
100			
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2022, BPS

Buruh/karyawan/pegawai adalah apabila seseorang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Status sebagai pekerja bebas hampir sama dengan buruh/karyawan/pegawai dengan perbedaannya adalah bahwa pekerja bebas tidak mempunyai majikan tetap (berganti-ganti majikan) atau memiliki lebih dari satu majikan dalam satu waktu secara bersamaan.

Pekerja keluarga/tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapatkan upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja keluarga biasanya adalah anggota rumah tangga orang yang berusaha, misalnya istri/suami, anak, adik/kakak, keponakan, atau famili lainnya.

Penduduk bekerja di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 didominasi oleh tenaga kerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan persentase mencapai 52,28 persen, sejalan dengan banyaknya perusahaan di Tanah Bumbu. Meskipun demikian minat berwirausaha penduduk bekerja juga cukup tinggi, terlihat dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri,

berusaha dibantu buruh dibayar, dan berusaha dibantu buruh tak dibayar yang mencapai sekitar 34,18 persen. Tingginya angka berusaha sendiri menunjukkan bahwa kebanyakan usaha adalah usaha mikro yang dikelola sendiri oleh pemiliknya. Sementara penduduk dengan status pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga mencapai 8,11 persen. Dilihat dari jenis kelamin, pekerja keluarga umumnya didominasi oleh perempuan. Ini disebabkan banyak istri yang umumnya membantu suaminya dalam bekerja, sehingga persentase perempuan yang menjadi pekerja keluarga tergolong tinggi, dari seluruh pekerja perempuan, 18,78 persen diantaranya merupakan pekerja keluarga, berarti 1 dari 6 pekerja perempuan merupakan pekerja keluarga.

https://anahbumbukab.bps.go.id



KONSUMSI RUMAH TANGGA



https://anahbumbukab.bps.go.id



Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang sangat tergantung dari budaya dan lingkungan setempat. Kebiasaan penduduk suatu wilayah dapat berpengaruh terhadap jenis makanan yang dikonsumsi sekaligus kuantitasnya. Pengeluaran penduduk dapat dilihat berdasarkan pengeluaran makanan dan non makanan. Secara umum, semakin besar proporsi pengeluaran non makanan penduduk suatu wilayah maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan wilayah tersebut. Penyebab dari adanya linearitas proporsi pengeluaran tersebut adalah karena pengeluaran makanan yang merupakan pengeluaran paling pokok bagi manusia. Sehingga jika proporsi pengeluaran bukan makanan suatu penduduk jauh lebih besar dari pengeluaran makanan maka dapat disimpulkan secara kasar bahwa kebutuhan pokok penduduk tersebut sudah terpenuhi.

Di sisi lain, berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui perbandingan antara tingkat pendapatan dengan tingkat kebutuhan minimum untuk hidup layak.

Tingkat kesejahteraan masyarakat selain dapat diukur dengan pendapatan perkapita, juga dapat dilihat melalui pola konsumsi atau pengeluaran rumah tangga berdasarkan pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pada umumnya data mengenai pendapatan sulit dikumpulkan. Hambatan teknis pada saat wawancara ialah adanya kecenderungan responden memberikan jawaban yang kurang relevan. Sebaliknya apabila ditanyakan tentang pengeluaran konsumsi, responden akan memberikan jawaban yang cenderung jujur dan relevan. Oleh karena itu, digunakan pendekatan melalui besarnya pengeluaran dalam suatu rumah tangga dalam suatu jangka waktu tertentu baik untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Besarnya nilai nominal (rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun non makanan,

secara tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga, untuk mencukupi kebutuhan yang mencakup barang dan jasa.

Kenaikan harga kebutuhan pokok (konsumsi), biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan sebagainya yang tidak diimbangi dengan adanya peningkatan pendapatan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya daya beli. Program-program yang dilakukan secara instan seperti pengadaan beras murah atau raskin oleh pemerintah memang mampu meningkatkan daya beli kebutuhan dasar (makanan) yang mencapai 20 persen, namun harus ditunjang dengan program pemberdayaan ekonomi rumah tangga lainnya yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan daya belinya secara berkelanjutan.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan dan daya beli masyarakat mengingat sulitnya mendapatkan data pendapatan yang valid. Menurut jenisnya, pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan untuk bukan makanan. Pola pengeluaran rumah tangga ini dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Seorang ekonom Rusia bernama Ernest Engel melakukan penelitian mengenai perilaku konsumen dan menghasilkan generalisasi mengenai hubungan perilaku konsumen dan pendapatan yang disebut sebagai Teori Engel. Teori Engel (1857) menyatakan bahwa "Semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga, semakin rendah persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan". Oleh karena itu, negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan ratarata pengeluaran per kapita penduduk Tanah Bumbu sebesar 1,65 juta rupiah setiap bulan. Secara nominal, angka ini sedikit mengalami peningkatan dibanding Maret 2021, dimana rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 1,64 juta rupiah. Peningkatan pengeluaran ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.



Gambar 14 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2018-2023 (Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Jika dibandingkan dengan pengeluaran lima tahun lalu, pengeluaran penduduk Tanah Bumbu tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 21,03 persen, yaitu dari 1,36 juta rupiah pada 2018 menjadi 1,65 juta rupiah pada 2023. Namun, jika dilihat perkembangan setiap tahunnya, pengeluaran penduduk Tanah Bumbu sempat mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020, baik pengeluaran untuk makanan maupun bukan makanan. Penurunan pengeluaran konsumsi tersebut akibat adanya pandemi Covid-19 yang secara nyata berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Adanya pembatasan kegiatan selama pandemi menyebabkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan yang berdampak pada berkurangnya pendapatan. Meskipun demikian, sejak tahun 2021, pengeluaran penduduk di Tanah Bumbu mulai sedikit mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan penduduk. Bahkan, pada tahun 2022, terjadi peningkatan pengeluaran penduduk Tanah Bumbu yang cukup tajam, yaitu dari 1,38 juta rupiah pada 2021 menjadi 1,64 juta rupiah pada 2022. Pengeluran bukan makanan tahun 2022 bahkan mengalami peningkatan sebesar 25,31 persen dibanding tahun 2021. Sejalan dengan Teori Engel, fenomena pengeluaran penduduk Tanah Bumbu 2022 mengindikasikan adanya kenaikan pendapatan masyarakat Tanah Bumbu yang diiringi dengan penurunan alokasi pengeluaran untuk makanan. Secara keseluruhan, fluktuasi pengeluaran penduduk lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Tanah Bumbu sudah mampu kembali bangkit setelah terjadi penurunan daya beli masyarakat pada saat pandemi Covid-19.

Tabel 13 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Barang Rumah Tangga Kabupaten Tanah Bumbu, 2022 dan 2023

No	Kelompok Barang	Rata-rata Pengeluaran per Kapita (Rp)		Persentase (%)	
		2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Padi-Padian	77.477	87,723	4,72	5.33
2	Umbi-Umbian	4.323	5,718	0,26	0.35
3	Ikan	80.897	80,835	4,93	4.91
4	Daging	34.517	36,089	2,10	2.19
5	Telur Dan Susu	44.756	44,473	2,73	2.70
6	Sayur-Sayuran	58.352	61,994	3,55	3.77
7	Kacang-Kacangan	14.100	15,240	0,86	0.93
8	Buah-Buahan	31.655	34,760	1,93	2.11
9	Minyak Dan Lemak	27.884	19,710	1,70	1.20
10	Bahan Minuman	22.025	22,355	1,34	1.36
11	Bumbu-Bumbuan	18.474	17,691	1,13	1.07
12	Konsumsi Lainnya	16.752	17,772	1,02	1.08
13	Makanan Minuman Jadi	270.058	296,532	16,45	18.01
14	Rokok Dan Tembakau	86.986	101,497	5,30	6.17
Total	Makanan	683.436	788.255	48,01	51,17
	Perumahan Dan Fasilitas	441.386	434,060	26,89	26.37
15	Rumah Tangga				
16	Aneka Barang Dan Jasa	168.740	155,879	10,28	9.47
	Pakaian, Alas Kaki, Dan	44.316	45,232	2,70	2.75
17	Tutup Kepala				
18	Barang Tahan Lama	118.806	68,559	7,24	4.16
19	Pajak, Pungutan Dan	57.218	52,191	3,49	3.17

	Asuransi				
	Keperluan Pesta Dan	22.966	47,997	1,40	2.92
20	Upacara/Kenduri				
Total	Bukan Makanan	667.530	853.432	51,99	48,83
TOTA	L PENGELUARAN	1.350.966	1.641.686	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Berdasarkan jenis pengeluarannya, setiap bulannya, rata-rata penduduk Tanah Bumbu pada tahun 2023 menghabiskan 788,2 ribu rupiah untuk konsumsi makanan dan 853,4 ribu rupiah untuk konsumsi bukan makanan. Dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2022, pengeluaran makanan mengalamai peningkatan yang lebih besar yaitu 6,87 persen, sementara pengeluaran bukan makanan justru mengalami penurunan sebesar 5,8 persen. Hal ini mengakibatkan terjadinya *shifting* pola konsumsi penduduk Tanah Bumbu pada tahun 2023, dimana kontribusi pengeluaran untuk makanan (51,17 persen) kembali lebih tinggi dibanding pengeluaran bukan makanan (48,83 persen).

Jika dilihat secara lebih rinci setiap kelompok barang, pengeluaran untuk padipadian, umbi-umbian, dan rokok pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding tahun 2022. Fenomena ini wajar terjadi mengingat adanya kenaikan harga beras dan harga rokok yang cukup tinggi pada tahun 2023. Adapun, rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi pada tahun 2023 diduduki kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga dengan persentase mencapai 26,37 persen. Lebih dari seperempat dari total pengeluaran penduduk Tanah Bumbu dialokasikan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yang meliputi pengeluaran untuk sewa rumah, listrik, air, gas, dan sebagainya. Hal ini sangat wajar karena rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan utama rumah tangga yang harganya semakin meningkat setiap tahunnya. Secara umum, pola pengeluaran masyarakat Tanah Bumbu menurut kelompok barang pada tahun 2022 dan 2023 cenderung sama. Namun, terdapat pola konsumsi makanan penduduk Tanah Bumbu yang cukup disayangkan, yaitu pengeluaran untuk rokok dan tembakau (6,17 persen) masih jauh lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk padi-padian (5,33 persen), ikan (4,91 persen), daging (2,19 persen), dan telur dan susu (2,7 persen). Fenomena ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat agar mengurangi konsumsi rokok dan mengalokasikan untuk pengeluaran lain yang lebih bermanfaat bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Selain itu, pemerintah harus dengan tegas membuat dan menerapkan aturan pelarangan merokok di fasilitas publik.

Tabel 14 Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per hari penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 dan 2023

Jenis Konsumsi	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Kalori (kkal) Protein (gram)	2.155,24 66,62	2.176,52 68,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Rata-rata konsumsi kalori dan protein perkapita perhari masyarakat Tanah Bumbu tergolong cukup baik. Rata-rata konsumsi kalorinya pada tahun 2023 sebesar 2.176 kkal, mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 2.155 kkal. Secara rata-rata laki-laki dewasa memerlukan 2.500 kkal, sedangkan perempuan dewasa memerlukan 2.000 kkal perharinya. Hal ini berarti bahwa secara umum, konsumsi penduduk Tanah Bumbu telah melebihi kebutuhan kalori pada umumnya. Sementara itu konsumsi protein perhari perkapita masyarakat Tanah Bumbu pada tahun 2023 sebesar 68,67 gram, naik 3,08 persen dibanding tahun 2022. Angka ini sudah memenuhi AKG Protein berdasarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, yakni sebesar 62-65 gram untuk laki-laki dewasa dan 56 gram bagi perempuan dewasa.

Selain melihat dari segi komoditas dan kandungan protein, kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran pada tiap kelompok pengeluaran sehingga dapat menggambarkan pemerataan antargolongan. Teori Engel (1857) menyatakan bahwa "Semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga, semakin rendah persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan". Sejalan dengan teori tersebut, Hukum Working (1943) juga menyatakan bahwa "Semakin rendah tingkat pendapatan rumah tangga ada kecenderungan mencukupi kebutuhan makanan terlebih dahulu sehingga proporsi pengeluaran untuk makanan lebih tinggi dibanding pengeluaran bukan makanan

Tabel 15 Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per hari penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 dan 2023

Kelompok	Makanan		Bukan Makanan		Total	
Pengeluaran	2022	2023	2022	2023	2022	2023
40% Bawah	525,756	576,267	427,318	383,072	953,074	959,339
40% Tengah	804,589	882,790	714,915	715,507	1,519,505	1,598,298
20% tinggi	1,280,599	1,291,125	1,982,512	1,814,060	3,263,111	3,105,185
Rata-rata per Kapita	788,255	842,389	853,432	803,919	1,641,686	1,646,308

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Dari tabel 15, terlihat bahwa semakin tinggi golongan kelompok pengeluaran, semakin besar juga rata-rata pengeluaran setiap bulannya. Pada kelompok pengeluaran 20 persen tertinggi, pengeluaran per kapita setiap bulan pada tahun 2023 mencapai 3,1 juta rupiah, lebih dari tiga kali lipat dibanding rata-rata pengeluaran per kapita penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan pada rata-rata jumlah pengeluaran antar kelompok pengeluaran.

Gambar 15 Persentase Pengeluaran untuk Makanan dan Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita, Tahun 2022 dan 2023 (persen)





Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Kemiskinan

Jika dilihat berdasarkan pola pengeluarannya, gambar di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran, semakin besar rata-rata pengeluaran yang dialokasikan untuk pengeluaran bukan makanan. Pada tahun 2023, masyarakat yang berada pada kelompok 40 persen bawah mengalokasikan lebih dari 60 persen pengeluaran untuk makanan, sementara masyarakat pada kelompok 20 persen atas hampir 60 persen pengeluaran digunakan untuk pengeluaran bukan makanan. Pola pengeluaran tersebut juga terjadi pada tahun 2022. Perbedaan kecenderungan pola pengeluaran antar kelompok pengeluaran di Tanah Bumbu sejalan dengan teori-teori para ahli ekonomi yang menyatakan adanya hubungan terbalik antara pendapatan dan proporsi pengeluaran makanan. Pada kelompok bawah, pengeluaran lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang merupakan kebutuhan utama terlebih dahulu

BAB 6 PERUMAHAN



https://anahbumbukab.bps.go.id



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta sebagai bagian dari permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

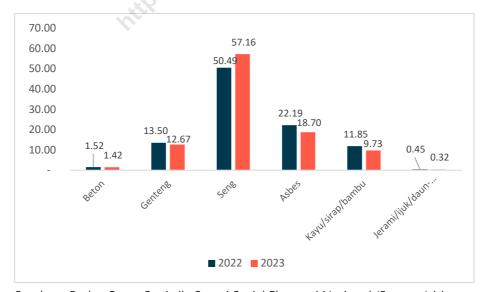
Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan, memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat. Tentu saja hal ini dengan tetap memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kondisi lingkungan termasuk rumah sangat erat kaitannya dengan kesehatan, karena fasilitas rumah dan lingkungan yang tidak sehat akan berpengaruh terhadap kesehatan dari penghuninya. Perumahan dengan kondisi tidak sehat atau sempit mengakibatkan mudah berjangkitnya penyakit di dalam rumah tersebut. Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, biologi di dalam rumah dan perumahan yang memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Selain kondisi rumah yang layak juga harus memiliki sumber air minum yang bersih serta tempat pembuangan tinja yang sesuai standar kesehatan dan lingkungan. Selain itu kondisi rumah yang ditempati suatu keluarga secara tidak langsung juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Dengan demikian akan diperoleh gambaran seberapa layak rumah yang dihuni oleh masyarakat di suatu daerah.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Abraham Maslow (1943) dalam makalahnya yang berjudul "A Theory of Human Motivation" memperkenalkan adanya hierarki kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Setiap individu harus memenuhi kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan terlebih dahulu, maka individu tersebut baru akan memuaskan kebutuhan pada tingkat diatasnya, seperti kebutuhan rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Sebelum individu memenuhi kebutuhan fisilologis dasar, individu tersebut tidak akan mampu memenuhi dan memuaskan kebutuhan tingkat berikutnya. Adapun, kebutuhan fisiologis dasar yang harus dipenuhi setelah sandang dan pangan, adalah kebutuhan akan tempat tinggal untuk berlindung. Rumah mempunyai fungsi penting dalam kehidupan manusia. Selain sebagai tempat berlindung, rumah juga menjadi tempat untuk pembinaan keluarga. Menurut kerangka kerja monitoring SDGs, rumah yang layak huni dan terjangkau setidaknya harus memenuhi lima kriteria, yaitu ketahanan/kualitas bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, akses sanitasi layak, dan keamanan bermukim.

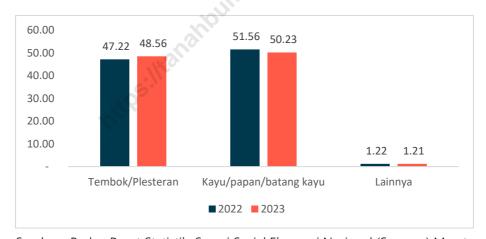
Gambar 16 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2022 dan 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Berdasarkan hasil Susenas Maret, sebagian besar tempat penduduk Tanah Bumbu sudah memiliki kualitas bangunan yang baik. Rumah tangga yang menempati tempat tinggal dengan atap layak seperti beton, genteng, sirap dan seng, mengalami peningkatan dari 87,70 persen pada 2022 menjadi 89,95 persen pada 2023. Namun, jika dilihat lebih rinci, sebagian besar rumah tangga di Tanah Bumbu menempati tempat tinggal yang atap terluasnya berupa seng, yaitu 57,16 persen pada tahun 2023. Hal ini disebabkan sebagian besar tempat tinggal di Tanah Bumbu berbentuk rumah panggung untuk menyesuaikan keadaan geografis Tanah Bumbu yang sebagian besar berupa rawa. Seng dan asbes memiliki beberapa keunggulan yaitu mudah dicari, pemasangan yang simple, lebih ringan sehingga cocok dengan rumah yang berdinding kayu. Selain atap, bagian rumah lainnya seperti dinding dan lantai juga mengikuti bentuk bangunan.

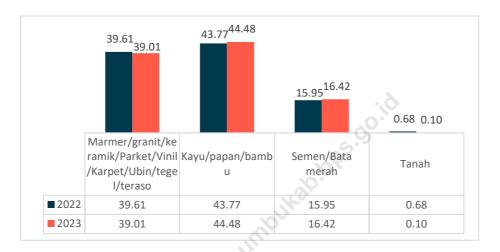
Gambar 17 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2022 dan 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Hasil Susenas Maret 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa kayu masih mendominasi bahan yang digunakan sebagai dinding tempat tinggal rumah tangga di Tanah Bumbu. Lebih dari setengah rumah tangga di Tanah Bumbu menggunakan dinding terluas berupa kayu, yaitu 51,56 persen pada 2022 dan 50,23 persen pada 2023. Selain lebih murah, kayu juga lebih ringan dan cocok dengan rumah yang berbentuk panggung. Secara umum, pada tahun 2023, tempat tinggal rumah tangga di Tanah Bumbu sudah mempunyai dinding yang layak (dinding terluasnya berupa tembok, plesteran, anyaman bambu/kawat, dan kayu/papan), yaitu 98,79 persen.

Gambar 18 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Luas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2022 dan 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Jika dilihat dari jenis lantai terluasnya, hampir seluruh tempat tinggal rumah tangga di Tanah Bumbu sudah memiliki kualitas yang layak. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah berlantai bukan tanah mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yaitu dari 99,32 persen pada 2022 menjadi 99,90 persen pada 2023. Hal ini menunjukkan hampir seluruh rumah tangga di Tanah Bumbu sudah menempati tempat tinggal yang berlantai bukan tanah. Meskipun demikian, masih terdapat 0,1 persen rumah tangga yang lantai tempatnya berupa tanah, biasanya terdapat di wilayah pedesaan yang tekstur tanahnya cukup keras. Sementara itu, material lantai bangunan tempat tinggal rumah tangga di Tanah Bumbu pada 2023 masih didominasi oleh penggunaan kayu yang mencapai 44,48 persen, naik dibanding pada tahun 2022 yang sebesar 43,77 persen. Tingginya persentase lantai kayu ini tidak terlepas dari bentuk umum tempat tinggal di Tanah Bumbu berupa rumah panggung, sehingga material lantai berupa kayu lebih ringan dan cocok untuk rumah panggung.

Selain melihat kualitas bahan lantai, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan, menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan

aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak, serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001). Adapun, jika mengacu pada SK Menteri Perumahan Rakyat maka luas lantai per kapita rumah yang layak huni adalah >7,2 m². Artinya jika rumah tangga berisi 4 orang ART idealnya memiliki bangunan tempat tinggal dengan luas minimum 29 m².

Tabel 16 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu ,Tahun 2022 dan 2023

Luas Lantai per Kapita (m²)	2022	2023
(1)	(2)	(3)
<= 7.2	8,23	10,63
<= 7,2 7,3 - 9,9 >= 10	6,27	4,90
>= 10	85,50	84,47
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Berdasarkan data Susenas Maret 2023, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni berdasarkan luas lantainya mencapai 84,47 persen, sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang mencapai 91,77 persen. Artinya, masih terdapat 10,63 persen rumah tangga yang tidak layak huni berdasarkan luas lantainya di Tanah Bumbu pada 2023.

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Rumah yang layak huni tidak hanya diindikasikan oleh bentuk dan kondisi bangunan fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti sumber penerangan, sumber air minum bersih, fasilitas jamban sendiri, sanitasi layak, dan fasilitas MCK (mandi cuci kakus) yang memadai.

Rumah tangga dikategorikan memiliki akses terhadap air minum bersih apabila sumber untuk air minum berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ≥ 10 meter dari penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Sementara itu, akses air minum layak adalah jika sumber air minum utama yang digunakan rumah tangga adalah leding, air terlindungi dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Tersedianya sumber air minum bersih juga merupakan salah satu target yang ingin dicapai melalui tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Hasil penelitian Zwane dan Krener (2007) mengemukakan bahwa kurangnya akses terhadap sumber air minum bersih merupakan faktor kunci penyebab terbesar penyakit diare di sebagian besar negara-negara berkembang.

Tabel 17 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Tanah Bumbu,
Tahun 2022 dan 2023

Fasilitas Perumahan	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Sumber Air Minum Bersih	85,33	88,67
Akses Air Minum Layak	64,04	62,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Menurut hasil Susenas Maret 2022-2023, persentase rumah tangga di Tanah Bumbu pada tahun 2023 yang mengakses sumber air minum bersih mengalami peningkatan, sedangkan yang mengakses air minum layak mengalami penurunan. Dari tabel di atas terlihat bahwa rumah tangga yang dapat

mengakses sumber air minum bersih meningkat sekitar tiga persen poin dari 85,33 persen pada tahun 2022 menjadi 88,67 persen pada tahun 2023. Sebaliknya, sebaliknya rumah tangga yang mengakses air minum layak turun dari 64,04 persen pada tahun 2022 menjadi 62,04 persen pada tahun 2023.

Selain akses terhadap air minum, fasilitas sanitasi juga menjadi salah satu kriteria tempat tinggal yang layak dan sehat. Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL).

Gambar 19 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2022 dan 2023



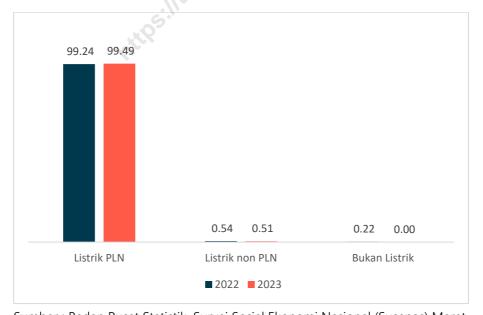
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Berdasarkan data Susenas Maret 2023, 95,90 persen rumah tangga di Tanah Bumbu sudah memiliki jamban sendiri, meningkat dibanding pada tahun 2022 yang sebesar 94,09 persen. Tempat tinggal yang memiliki fasilitas buang air besar (BAB) yang digunakan sendiri biasanya akan lebih terjaga kebersihannya. Sementara itu, masih ada sekitar 4,09 persen rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar secara bersama maupun umum. Adapun jenis kloset yang digunakan oleh rumah tangga di Tanah Bumbu mayoritas sudah berupa kloset leher angsa, yaitu 95,63 persen pada tahun 2022 dan 98,52 persen pada tahun 2023. Meskipun demikian, 1 dari 100 rumah tangga di Tanah Bumbu masih menggunakan kloset jenis cemplung/cubluk. Rumah tangga

tersebut biasanya bertempat tinggal di pinggir sungai. Sementara itu, tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan mayoritas rumah tangga di Tanah Bumbu berdasarkan hasil Susenas Maret 2023 sudah menggunakan tangki septik/IPAL, meskipun masih terdapat 17,51 persen rumah tangga yang pembuangan akhir tinjanya adalah Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut/Lubang Tanah. Rumah tangga yang belum memiliki fasilitas perumahan layak dapat menjadi sasaran program bantuan bedah rumah untuk memperbaiki kualitas tempat tinggal yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu.

Fasilitas perumahan lainnya yang tidak kalah penting adalah sumber penerangan listrik yang idealnya adalah berasal dari listrik PLN. Meskipun menurut BPS sumber penerangan listrik tidak lagi menjadi syarat rumah layak huni sejak tahun 2019, namun saat ini energi listrik tetap merupakan sumber yang sangat penting bagi kehidupan masyakarat di era serba digitalisasi seperti sekarang ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan penerangan, energi listrik juga bermanfaat untuk mendukung kehidupan sehari-hari yang melibatkan penggunaan barang-barang elektronik, baik peralatan rumah tangga maupun perkantoran.

Gambar 20 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2022 dan 2023

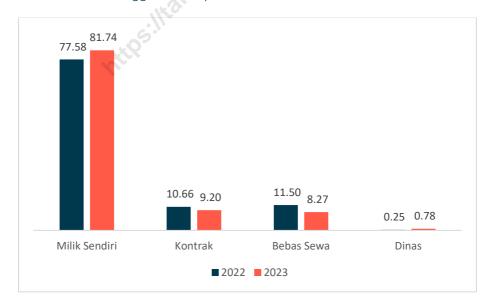


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Berdasarkan data Susenas Maret, rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik sebagai sumber penerangan utama di Tanah Bumbu sudah lebih dari 99 persen pada tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sudah hampir seluruh rumah tangga di Tanah Bumbu sudah mendapatkan akses listrik sebagai sumber penerangan. Meskipun demikian, pada tahun 2022 masih terdapat 0,22 persen rumah tangga di Tanah Bumbu yang belum terjangkau listrik, baik listrik PLN maupun non-PLN. Namun, pada tahun 2023, hampir tidak ada lagi rumah tangga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama.

Setelah melihat kualitas/ketahanan dan fasilitas tempat tinggal, mengukur tingkat kesejahteraan penduduk akan semakin lengkap dengan mempertimbangkan status kepemilikan tempat tinggal yang dihuni. Setiap rumah tangga idealnya dapat menempati tempat tinggal yang merupakan milik sendiri karena rumah tangga yang mempunyai tempat tinggal milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan fisilogis dasar akan tempat tinggal yang aman, terjamin, dan permanen dalam jangka panjang.

Gambar 21 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2022 dan 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Kemiskinan

Gambar di atas menunjukkan presentase rumah tangga di Tanah Bumbu pada tahun 2023 yang memiliki rumah tinggal berstatus milik sendiri adalah sebesar 81,77 persen, naik 4,16 persen poin dibanding tahun 2022 yang sebesar 77,58 persen. Hal ini menunjukkan sedikit peningkatan taraf hidup masyarakat di Tanah Bumbu. Meskipun demikian, pada tahun 2023, masih terdapat 9 dari 100 rumah tangga di Tanah Bumbu yang menempati rumah kontrakan dan 8 dari 100 rumah tangga yang tinggal di tempat tinggal berstatus bebas sewa. Rumah tangga dengan status kepemilikan tempat tinggal bebas sewa ini biasanya mereka yang menempati rumah peninggalan orang tua atau saudara yang belum ada serah terima kepemilikan secara sah.

74





https://anahbumbukab.bps.go.id



Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi seluruh negara dalam melaksanakan pembangunan. Kenyataannya masalah kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang memang lebih kompleks dan bersifat multidimensional karena sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Pemerintah menyadari bahwa masalah kemiskinan selalu menjadi salah satu prioritas utama untuk ditangani dalam proses pembangunan. Kegagalan dalam menangani masalah kemiskinan dapat menyebabkan munculnya beberapa persoalan lanjutan seperti sosial, politik dan keamanan di tengah - tengah masyarakat.

Kemiskinan menurut World Bank (2000) didefinisikan sebagai, "poverty is pronounced deprivation in well-being" yang bermakna bahwa kemiskinan adalah terampasnya kesejahteraan. Sedangkan permasalahan inti pada kemiskinan ini adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. United Nations Development Programme (UNDP) mendefiniskan kemiskinan ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialpolitik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak negara ini merdeka melalui berbagai upaya penganggulangan masalah sosial. Bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang Undang Dasar 1945 memiliki perhatian besar demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Upaya serius melalui program penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak era Orde Baru selama periode Repelita. Meskipun sempat dihantam

dengan krisis ekonomi yang memicu krisis lainnya, program-program penanggulangan kemiskinan terus dilakukan sampai sekarang dan diperbaiki bentuknya mengikuti perkembangan kondisi masyarakat agar diperoleh hasil maksimal.

Penanggulangan kemiskinan ini menjadi semakin penting mengingat kemiskinan menjadi sebab terciptanya masalah sosial lain di tengah masyarakat. Permasalahan seperti kebodohan, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia maupun masalah sosial lainnya seringkali bermula dari kondisi kemiskinan yang terjadi. Hal-hal seperti ini lebih mungkin terjadi pada anak yang lahir dari keluarga menengah ke bawah. Berbagai masalah sosial lanjutan yang mungkin muncul dari adanya kemiskinan mengharuskan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk selalu menjadikan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama.

Penanggulangan kemiskinan secara strategis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh masyarakat mampu menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan ketersediaan data yang akurat menjadi sesuatu hal yang wajib dimiliki. Data kemiskinan ini dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang setiap tahunnya melaksanakan survei yang salah satu tujuannya adalah untuk mengukur kondisi kemiskinan masyarakat. Data kemiskinan yang akurat dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menjadi dasar masukan bagi program pengentasan kemiskinan selanjutnya agar tepat sasaran.

Pembahasan tentang kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari pembahasan ekonomi. Beberapa studi empiris, seperti Deininger dan Squire (1995,1996) menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan angka kemiskinan. Namun studi yang dilakukan oleh World Bank (1990), Fields dan Jakobson (1989) dan Ravallion (1995), menunjukkan tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Kajian-kajian empiris di atas pada hakekatnya adalah menguji hipotesis Kuznets di mana hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif, sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Hubungan ini sangat terkenal dengan nama kurva U terbalik dari kuznets. Kuznets menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif kemudian menjadi negatif, menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri.

Meski demikian variabel pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan, terdapat beberapa variabel dominan lainnya yang berperan dalam mempengaruhi pola kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan serta variabel lainnya sangat mempengaruhi pola kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan adalah kondisi yang utama (necessary condition) tetapi perlu variabel-variabel pendukung lainnya (sufficient conditions) untuk menekan angka kemiskinan. Identifikasi terhadap necessary conditions dan sufficient conditions sangat membantu pengambil keputusan untuk membuat kebijakan, membuat analisa, atau peramalan yang dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan usaha untuk menekan kemiskinan.

Pada banyak kasus, sering pula dijumpai negatifnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Ada beberapa alasan mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak pada penurunan kemiskinan. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan, karena ketidakmampuan untuk menyerap banyak tenaga kerja, sementara salah satu masalah dalam kemiskinan adalah pengangguran. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah proteksi tertentu juga tidak menjamin akan dapat menyelesaikan kemiskinan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh industri canggih juga berpotensi memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran jika struktur tenaga kerja yang ada didominasi oleh tenaga kerja berkemampuan rendah, karena industri canggih umumnya memanfaatkan banyak mesin (capital-intensive industry) dan hanya memerlukan sedikit tenaga kerja ahli.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktorfaktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan.

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan

bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mempu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pengeluaran.

Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhaan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mempu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pengeluaran. Ukuran kemiskinan yang sering digunakan Bank Dunia adalah menggunakan batas kemiskinan PPP US\$ perkapita per hari. Saat ini ukuran yang digunakan Bank Dunia adalah US\$ 1,90 perkapita per hari.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang artinya keuangan/pendapatan bukan satu-satunya ukuran yang harus diperhatikan. Banyak variable non keuangan yang juga dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan secara lebih luas. Ranis, Ravallion dan Datt menurut analisanya dalam publikasi World Bank memasukan faktor seperti tingkat kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, hak mendapatkan informasi, layanan kesehatan yang mudah dan murah, perasaan aman baik dalam mendapatkan pendidikan dan lapangan kerja, dan lain lain.

BPS menghitung kemiskinan dengan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Komponen kebutuhan dasar yang digunakan BPS ini terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per

kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan penting dalam pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Banyak aspek yang terlibat dengan kemiskinan, seperti kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Hubungan ini tampak seperti timbal balik. Jika tidak diputus, maka lingkaran ini akan tetap berlanjut, bahkan tingkat kemiskinan akan semakin dalam. Oleh karena itu, penting untuk melihat perkembangan jumlah, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dalam rangka menyiapkan strategi program penanggulangan kemiskinan.

7.1. Perkembangan Kemiskinan Tanah Bumbu

Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 0,56 persen setelah sempat meningkat pada tahun 2021. Kenaikan persentase kemiskinan pada 2021 diperkirakan terkait dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak aktivitas perekonomian yang lumpuh pada sejak tahun 2020 dan masih berlanjut pada 2021. Penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2022 menunjukkan perekonomian yang berangsur pulih pasca Covid-19.

Tabel 18 Perkembangan Kondisi Kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu 2018-2022

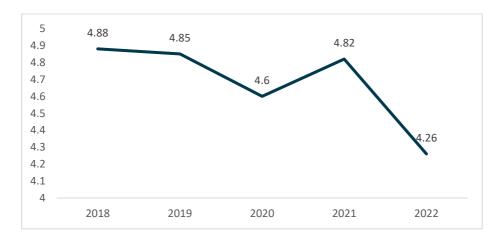
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/ Bulan)	451.714	475.763	513.803	530.568	557.500
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	17,06	17,34	16,83	18,92	17,22
Presentase Penduduk Miskin / P0 (%)	4,88	4,85	4,60	4,82	4,26
Tingkat Kedalaman / P1	0,63	0,79	0,69	0,65	0,36
Tingkat Keparahan / P2	0,14	0,19	0,14	0,12	0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Kombinasi program pembangunan dari pemerintah pusat maupun daerah dalam usaha pengentasan kemiskinan terlihat menunjukkan hasil yang positif dengan menurunnya angka kemiskinan. Program pemerintah pusat untuk rakyat miskin seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di dukung oleh program dari pemerintah daerah di bidang kesehatan dan pendidikan tentu membantu semua lapisan masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah dan bawah. Usaha tersebut dalam bentuk upaya mengurangi beban hidup masyarakat miskin dengan menjamin kesehatan dan pendidikannya sehingga masyarakat terutama masyarakat miskin tidak terbebani biaya kesehatan dan pendidikan, serta membantu masyarakat memenuhi salah satu kebutuhan primernya, yakni kebutuhan pangan.

Peningkatan pendapatan masyarakat selama ini, dibantu dengan berbagai program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, secara relatif mampu mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga meskipun garis kemiskinan secara rata-rata menunjukkan kenaikan akan tetapi secara rata-rata pendapatan masayarakat juga meningkat. Perkembangan garis kemiskinannya terus meningkat sejalan dengan tingkat inflasi. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan jumlah kemiskinan antara lain tingkat inflasi yang rendah, kenaikan upah, dan kenaikan nilai tukar petani (NTP). Membaiknya kondisi perekonomian diharapkan berpengaruh positif terhadap seluruh lapisan masyarakat termasuk penduduk miskin. Diharapkan pendapatan mereka terus mengalami kenaikan sehingga daya beli tidak menurun tergerus laju inflasi.

Gambar 22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Infrastruktur jalan yang baik secara langsung menghilangkan kendala aksesibilitas penduduk terutama wilayah perdesaan sehingga secara perlahan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi di desa maupun mempermudah akses ekonomi penduduk ke wilayah pusat ekonomi. Selain itu juga mempu menurunkan biaya transportasi sehingga secara langsung menjaga harga-harga agar tidak naik. Sementara program pengambilalihan beban biaya hidup masyarakat berupa pendidikan dan kesehatan gratis sangat membantu masyarakat dalam mempertahankan daya belinya. Selanjutnya pendapatannya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya diantaranya meningkatkan gizi anak, perbaikan lingkungan tempat tinggal dan lainnya.

7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

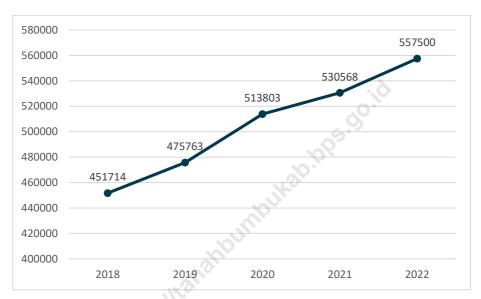
Banyaknya penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK) karena penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM).

GKM sendiri adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. GKM dihitung dari jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi untuk kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Sementara GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan per komoditi dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi tersebut terhadap total pengeluaran komoditi yang tercatat dalam Susenas modul konsumsi. Selanjutnya GKM dan GKNM dijumlahkan untuk diperoleh Garis Kemiskinan yang akan menentukan jumah penduduk miskin.

Kenaikan harga barang yang terjadi dari tahun ke tahun turut mempengaruhi besaran GK. Jika terjadi kenaikan harga pada komoditas kebutuhan dasar yang menjadi acuan penghitungan maka akan mempengaruhi nilai GK. Secara umum dalam rentang 2018-2022 garis kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu terus mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2018 lalu batas GK sebesar 451 ribu, pada tahun 2022 garis kemiskinan sudah mencapai 557 ribu. Artinya penduduk harus meningkatkan pendapatannya untuk mengimbangi kenaikan harga kebutuhan dasar sehari-hari yang setiap tahunnya. Jika kenaikan pendapatan tidak mampu

mengikuti kenaikan harga barang kebutuhan pokok tentu saja resiko untuk jatuh dalam kemiskinan semakin besar.

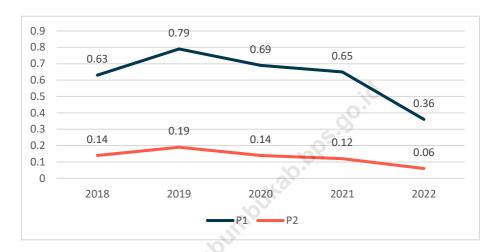
Gambar 23 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018-2021 (rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu

Indikator yang digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan persebaran pengeluaran antar penduduk miskin.

Gambar 24 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan 2021 menjadi 0,36 poin. Penurunan indeks ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain, peluang untuk mengangkat penduduk miskin untuk naik keatas garis kemiskinan menjadi lebih besar karena jaraknya antara rata-rata pengeluaran dan garis kemiskinan yang mengecil.

Sejalan dengan P_1 , Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) juga mengalami penurunan pada tahun 2022. Angka yang semula 0,12 poin di tahun 2021 turun menjadi 0,06 poin di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga mengalami penurunan.

https://anahbumbukab.bps.go.id

BAB 8 SOSIAL LAINNYA



https://anahbumbukab.bps.go.id



Pengaruh perubahan era globalisasi mulai terasa di kehidupan masyarakat saat ini. Perkembangan zaman telah memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap semua perubahan yang terjadi, baik perubahan positif maupun negatif. Tingkat kebutuhan mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi primer, seperti berlibur, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas.

Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan. Oleh karena itu, akses terhadap teknologi dan informasi menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kesejahteraaan masyarakat dapat juga dilihat dari penerima program perlindungan sosial, penerima jaminan sosial dan kepemilikan aset. Program-program serta jaminan tersebut diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sementara kepemilikan aset dapat membantu menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Seseorang yang berada pada tingkat kesejahteraan lebih tinggi cenderung mempunyai aset yang lebih banyak.

8.1. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi informasi mendorong masyarakat untuk beradaptasi agar tidak mengalami ketertinggalan informasi. Selain untuk mengakomodasi kebutuhan gaya hidup pada masa sekarang ini tuntutan akan penggunaan teknologi terutama internet dalam segala macam aktivitas mendorong meningkatnya penduduk yang mengakses internet. Anak sekolah memerlukan internet untuk mencari bahan pelajaran, pedagang memerlukan untuk pemasaran, hampir semua menggunakan email sebagai pengganti surat, pemerintah menggunakan internet untuk memudahkan pelayanan publik dan masih banyak lagi. Meningkatnya penggunaan internet diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa meningkatnya pengetahuan dan wawasan yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan.

Tabel 19 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun, 2022

Jenis Kelamin	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)	Mengakses Internet
(1)	(2)	(4)
Laki-laki Perempuan	90,98 82,26	79,34 63,34
Kabupaten Tanah Bumbu	90,45	78,37

Sumber: Susenas 2022, BPS

Perangkat yang digunakan untuk mengakses internet juga semakin murah sehingga saat ini sebagian besar dapat mengakses internet. Hampir setiap rumah tangga telah memiliki *smartphone*. Berdasarkan data Susenas pada tahun 2022 sebanyak 90,45 persen penduduk usia 5 tahun ke atas memiliki/menguasai telepon seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 bulan terakhir. Dilihat dari penduduk yang mengakses internet, sebanyak 78,37 persen penduduk usia 5 tahun ke atas mengakses internet dalam 3 bulan terakhir.

Potensi penggunaan internet masih sangat besar jika dilihat dari angka ini sehingga diharapkan operator seluler dan internet terus meningkatkan jangkauannya terutama ke wilayah yang jauh dari pusat perekonomian. Peran pemerintah tentunya diperlukan agar internet dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil dimana swasta tidak tertarik untuk mengerjakannya. Selain itu, diharapkan biaya internet yang sekarang ini masih relatif mahal dapat diturunkan dengan harapan akan lebih mudah dijangkau secara ekonomi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pentingnya akses terhadap internet dewasa ini menjadi indikasi perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama sejak masa pandemi dimana komunikasi banyak dilakukan melalui internet, termasuk proses pembelajaran dan pekerjaan. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, serta berbagai dukungan agar literasi internet semakin baik.

8.2. Program Perlindungan Sosial

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan atau kerentanan sosial. Program jaminan sosial dilaksanakan dalam bentuk bantuan tunai terkait pengalihan subsidi BBM, program beras sejahtera/ beras murah, kredit usaha dan juga bantuan untuk siswa tidak mampu.

91

Tabel 20 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program
Perlindungan Sosial di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Jenis Program	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
(1)	(2)
	\
BPNT	3,11
Kartu Perlindungan Sosial/Kartu	E 26
Keluarga Sejahtera [*]	5,26
PKH	6,21

Sumber: Susenas 2021, BPS

Catatan: *) Menerima KPS/KKS baik yang dapat menunjukkan kartu maupun tidak dapat menunjukkan kartu

Pada tahun 2022 berdasarkan hasil Susenas, sebanyak 3,11 persen rumah tangga menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program jaminan sosial lain yang diberikan oleh pemerintah adalah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau yang saat ini disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diterima oleh 5,26 persen rumah tangga di Kabupaten Tanah Bumbu. Tentunya semua berharap bantuan yang diberikan tepat sasaran sehingga dapat membantu menekan pengeluaran penduduk yang kurang mampu. Berbagai program perlindungan sosial ini menunjukkan semakin gencarnya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk.

8.3. Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan sosial berupa jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tabel 21 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Jenis Program	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menerima Jaminan Sosial
(1)	(2)
Jaminan Pensiun/Hari Tua*	12,59
Asuransi/PHK**	15,51

Sumber: Susenas 2022, BPS

Catatan: *) Jaminan pensiun terdiri dari: Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

**) Jaminan Asuransi/PHK terdiri dari: Asuransi kematian, Jaminan Kecelakaan

Kerja, dan Pesangon PHK

Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki jaminan sosial masih di bawah 20 persen. Asuransi/PHK terdiri dari jaminan pensiun, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kematian, dan pesangon PHK. Jaminan ini mencakup kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik maupun meninggal saat bekerja. Jaminan sosial ini biasanya diberikan oleh perusahaan yang mempunyai resiko kecelakaan kerja cukup besar seperti di perusahaan pertambangan batu bara, perusahaan industri CPO, dan sebagainya.

8.4. Kepemilikan Aset

Beberapa penelitian mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah kepemilikan aset (*ownership of assets*). Seperti yang disebutkan dalam teori pengeluaran rumah tangga sebelumnya, bahwa rumah tangga yang lebih sejahtera akan mengeluarkan lebih banyak proporsi untuk kebutuhan non makanan dan makanan, termasuk pengeluaran untuk pembelian aset. Aset yang dimaksud adalah barang modal yang bisa dimanfaatkan rumah tangga selama lebih dari satu tahun.

Tabel 22 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Menurut Jenis Aset di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Jenis Program	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset
(1)	(2)
Aset Fasilitas Rumah Tangga*	81,27
Aset Transportasi**	94,20

Sumber: Susenas 2022, BPS

Catatan: *) Aset Fasilitas Rumah Tangga terdiri dari: Lemari es/kulkas, AC, Pemanas air,
Televisi layar datar (minimal 30 inci), Tabung Gas, dan Telepon Rumah

**) Aset Transportasi terdiri dari: Sepeda Motor, Perahu, Perahu Motor, dan
Mobil

Hasil Susenas 2022 menunjukkan bahwa dari aset rumah tangga yang menjadi objek pertanyaan yang paling besar persentase kepemilikannya adalah Aset Transportasi dengan persentase sebesar 94,20 persen. Kondisi ini selaras dengan kondisi Kabupaten Tanah Bumbu sebagai kabupaten terluas kedua di Kalimantan Selatan sementara transportasi publik tidak banyak tersedia sehingga membutuhkan alat transportasi untuk bisa menjangkau daerah lain. Kondisi ini tentu membuat penduduk Tanah Bumbu mau atau tidak mau, mampu atau tidak mampu, harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan alat transportasi.





https://anahbumbukab.bps.go.id



Tabel 1 RSE Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Partisipasi Penggunaan Alat/cara KB di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Partisipasi Penggunaan Alat/Cara KB	RSE
(1)	(2)
illu.	
Pernah Menggunakan	13,03
Sedang Menggunakan	3,67
Tidak Pernah Menggunakan	9,84

Tabel 2 RSE Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Baca Tulis Huruf Latin dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Jenis Kelamin	RSE
(1)	(2)
Laki-laki	0,29
Perempuan	0,66
Tanah Bumbu	0,37

Tabel 3 RSE Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal+Non Formal menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021

APS	RSE			
7 H 3	Laki-laki	Perempuan	Tanah Bumbu	
(1)	(2)	(3)	(4)	
			•	
7-12	0,51	0,00	0,26	
13-15	3,37	0,00	1,80	
16-18	7,96	7,72	6,76	

Tabel 4 RSE Angka Partisipasi Murni (APM) Formal+NonFormal menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

APM	RSE		
	Laki-laki	Perempuan	Tanah Bumbu
(1)	(2)	(3)	(4)
SD+	0,51	0,67	0,42
SMP+	7,88	5,37	5,16
SMA+	10,45	7,89	8,21

Tabel 5 RSE Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

APM	RSE		
7	Laki-laki	Perempuan	Tanah Bumbu
(1)	(2)	(3)	(4)
		40.	
Tidak Punya Ijazah SD	11,86	10,12	8,88
SD/sederajat	6,39	6,44	5,38
SMP/sederajat	6,90	6,86	5,59
SMA/ka atas	5,11	6,62	4,83

Tabel 6 RSE Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas
Tempat Buang Air Besar, 2022

Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	RSE
(1)	(2)
Sendiri	1,10
Lainnya*	17,55

Catatan : *) Lainnya termasuk fasilitas bersama, MCK Umum, dan tidak menggunakan fasilitas buang air besar.

Tabel 7 RSE Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke
Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi
Informasi Selama Tiga Bulan Terakhir, 2022

Jenis Kelamin	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)	Mengakses Internet
(1)	(2)	(4)
Laki-laki Perempuan	1,06 5,53	1,67 7,57
Kabupaten Tanah Bumbu	1,05	1,63

Tabel 8 RSE Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2022

Jenis Program	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
(1)	(2)
BPNT	21,76
Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera	17,35
PKH	15,84

Tabel 9 RSE Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Jenis Program	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menerima Jaminan Sosial
(1)	(2)
Jaminan Pensiun/Hari Tua*	11,95
Asuransi/PHK**	10,79

Catatan: *) Jaminan pensiun terdiri dari: Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

Tabel 10 RSE Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Menurut
Jenis Aset di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Jenis Program	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset
(1)	(2)
Aset Fasilitas Rumah Tangga*	2,14
Aset Transportasi**	0,95

Catatan: *) Aset Fasilitas Rumah Tangga terdiri dari: Lemari es/kulkas, AC, Pemanas air,
Televisi layar datar (minimal 30 inci), Tabung Gas, dan Telepon Rumah

**) Aset Transportasi terdiri dari: Sepeda Motor, Perahu, Perahu Motor, dan
Mobil

^{**)} Jaminan Asuransi/PHK terdiri dari: Asuransi kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Pesangon PHK



DATA

MENCERDASKAN BANGSA - Enlighten The Nation -



Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Komplek Perkantoran Gunung Tinggi Jl. Dharma Praja, Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Telp/Fax: (0518) 6070006, Email: bps6310@bps.go.id

Website: tanahbumbukab.bps.go.id